



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III JAMBI**

**LAKIP
2021**



• • •

**Jl. Raya MTQ No. 2 Kel. Talang Bakung
Kec. Paal Merah, Kota Jambi
Provinsi Jambi**

Telp. 0741-573432 Fax. 0741-571525 Kode Pos 36139

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulilah segala puji dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021 dapat diselesaikan. LAKIP ini berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2021.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilakukan guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 339) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun Anggaran 2021.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja. Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi, dan semoga Allah SWT yang akan membalaunya, *wallahu 'alam*.

Jambi, Januari 2022

Kepala KKP Jambi,



Ali Isha Wardhana, SKM., MKM
NIP 196901271993031001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang : pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja kegiatan organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja diawali dengan penetapan kinerja sesuai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, dilengkapi data pengukuran indikator kinerja Kegiatan dan pengukuran pencapaian sasarnya. Realisasi Keuangan KKP Kelas III Jambi tahun 2021 dan LAKIP sub bagian dan seksi-seksi merupakan sumber data penyusunan LAKIP KKP Kelas III Jambi. Laporan kinerja tertuang dalam indikator kinerja kegiatan KKP Kelas III Jambi.

Analisis Kinerja yang digunakan yaitu analisis kinerja dari tiap sasaran strategis, bermaksud untuk mengetahui kinerja kegiatan dan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis baik parsial maupun komprehensif. Capaian sasaran strategis 2021 (komprehensif) dihitung menggunakan rerata dari kumulasi persentase capaian semua sasaran strategisnya.

Evaluasi diri (*self assessment*) atas Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja KKP Kelas III Jambi Tahun 2021 berdasarkan analisis capaian sasaran strategis menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 107,78%, berkategori baik, dengan capaian realisasi anggarannya sebesar 99,40%, juga berkategori baik. Adapun rincian target dan capaian indikator Perjanjian Kinerja KKP Kelas III Jambi untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Indikator 1 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan dari target sebesar 880.000, capaian sebesar 1.164.523 dengan persentase sebesar 132,33%.
2. Indikator 2 Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dari target sebesar 95%, capaian sebesar 100% dengan persentase sebesar 105,26%.
3. Indikator 3 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dari target sebesar 90%, capaian sebesar 112,50% dengan persentase sebesar 125,00%.
4. Indikator 4 Nilai kinerja anggaran dari target sebesar 83, capaian sebesar 83,74 dengan persentase sebesar 100,89%.



5. Indikator 5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari target sebesar 93, capaian sebesar 86,30 dengan persentase sebesar 92,80%.
6. Indikator 6 Kinerja implementasi WBK satker dari target sebesar 75, capaian sebesar 72,64 dengan persentase sebesar 96,85%.
7. Indikator 7 Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dari target sebesar 47%, capaian sebesar 47,62% dengan persentase sebesar 101,32%.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 116,57%, maka pada tahun 2021 ini capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 8,79%, hal ini karena ada dua indikator yang tidak mencapai target yaitu indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan indikator Kinerja implementasi WBK satker. Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tidak mencapai target disebabkan karena kurang aktif dalam melakukan penyesuaian halaman III DIPA sehingga akurasi pencairan dana tidak sesuai dengan perencanaannya, masih terdapat sisa penyetoran dana TUP kegiatan, pencairan anggaran belum proporsional sehingga belum sesuai dengan target penyerapan anggaran, kurang efektif dalam hal perhitungan pencapaian output, dan kurang teliti dalam penerbitan SPM karena masih ada kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN. Indikator Kinerja implementasi WBK satker tidak mencapai target disebabkan karena kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan informasi yang didapat oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tentang Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas untuk penilaian satker menuju WBK/WBBM, misalnya dalam hal program evaluasi atau standar dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian; adanya tugas ganda dari beberapa anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sehingga dibutuhkan waktu yang tepat untuk koordinasi antar tim; dan pendampingan oleh bagian Hukormas Ditjen P2P baru dilakukan setelah *pre assessment* oleh Tim Itjen Kemenkes RI.

Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja mencakup tatakelola (perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi & pengendalian) kegiatan dan program, SDM (kompetensi dan sinergi) dan pengalokasian/pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran yang kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja pada waktu-waktu yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Isu Strategis	2
C. Visi dan Misi	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi	6
E. Struktur Organisasi.....	7
F. Sumber Daya Manusia	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Perencanaan Kinerja	16
B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja)	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja	25
B. Realisasi Anggaran.....	58
BAB IV PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Tindak Lanjut.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jarak Tempuh dari Kantor Induk ke Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.....	2
Tabel 2. Distribusi Pegawai Menurut Golongan dan Ruang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021	10
Tabel 3. Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021.....	11
Tabel 4. Distribusi Pegawai Menurut Jabatan (Struktural dan Fungsional) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021.....	12
Tabel 5. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Target Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2020 – 2024	19
Tabel 6. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) KKP Kelas III Jambi Tahun 2021	20
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021	22
Tabel 8. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021.....	24
Tabel 9. Capaian Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2021	26
Tabel 10. Distribusi Kegiatan Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2020-2021	26
Tabel 11. Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan KKP Kelas III Jambi dengan KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2021	27
Tabel 12. Capaian faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Tahun 2021	30
Tabel 13. Capaian faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Tahun 2020 s.d Tahun 2021	30
Tabel 14. Capaian Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara di Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi Tahun 2021.....	34
Tabel 15. Capaian Indikator Indeks Pengendalian Faktor risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2020 s.d. Tahun 2021	35
Tabel 16. Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021	40
Tabel 17. Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tiap Bulan Tahun 2021	40
Tabel 18. Target dan Realisasi Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.....	44
Tabel 19. Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tiap Bulan Tahun 2021.....	45
Tabel 20. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2021	48
Tabel 21. Target dan Realisasi Kinerja Implementasi WBK Satker Tiap Bulan Tahun 2021.....	49
Tabel 22. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Tahun 2021	54
Tabel 23. Target dan Realisasi Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Tiap Bulan Tahun 2021.....	55
Tabel 24. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021.....	58
Tabel 25. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021	58



Tabel 26. Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2021 Indikator 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.....	59
Tabel 27. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 2 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021.....	59
Tabel 28. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 2 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021	59
Tabel 29. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2021 Indikator 2 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi	60
Tabel 30. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 3 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021.....	60
Tabel 31. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 3 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021	60
Tabel 32. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 3 Tahun 2020 – 2021 Indikator 3 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi	61
Tabel 33. Pagu dan realisasi anggaran Indikator Nilai Kinerja Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021	61
Tabel 34. Pagu dan realisasi anggaran Tiap Bulan Indikator Nilai Kinerja Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021	61
Tabel 35. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 – 2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.....	62
Tabel 36. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021.....	62
Tabel 37. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021.....	62
Tabel 38. Pagu dan realisasi anggaran Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021	63
Tabel 39. Pagu dan realisasi anggaran Tiap Bulan Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021	63
Tabel 40. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2020 – 2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.....	64
Tabel 41. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021.....	64
Tabel 42. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021.....	64
Tabel 43. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2021 Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.....	65



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Percentase Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Jabatan Tahun 2021.....	9
Grafik 2.	Distribusi Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Golongan dan Ruang Tahun 2021	10
Grafik 3.	Distribusi pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	11
Grafik 4.	Distribusi Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Jabatan Tahun 2021	13
Grafik 5.	Capaian Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2021	35
Grafik 6.	Perbandingan Realisasi indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis Tahun 2021	36
Grafik 7.	Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 dengan Target RPJMN 2021	40
Grafik 8.	Perbandingan Target, Capaian, dan Percentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 s.d. 2021	41
Grafik 9.	Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis Tahun 2021	41
Grafik 10.	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.....	45
Grafik 11.	Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dengan Instansi Sejenis	46
Grafik 12.	Perbandingan Realisasi Indikator Implementasi WBK di Satker Tahun 2021 dengan Target PermenpanRB No. 10 Tahun 2019	49
Grafik 13.	Perbandingan Target, Capaian, dan Percentase Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2020 s.d. 2021	51
Grafik 14.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis tahun 2021	51
Grafik 15.	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Percentase Peningkatan Kapasitas ASN Tahun 2021	55
Grafik 16.	Perbandingan Percentase Peningkatan Kapasitas ASN Tahun 2020 s.d. 2021	56
Grafik 17.	Perbandingan Realisasi Indikator Percentase Peningkatan Kapasitas ASN KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis Tahun 2021	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi 1



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021 8



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja KKP Kelas III Jambi Tahun 2021

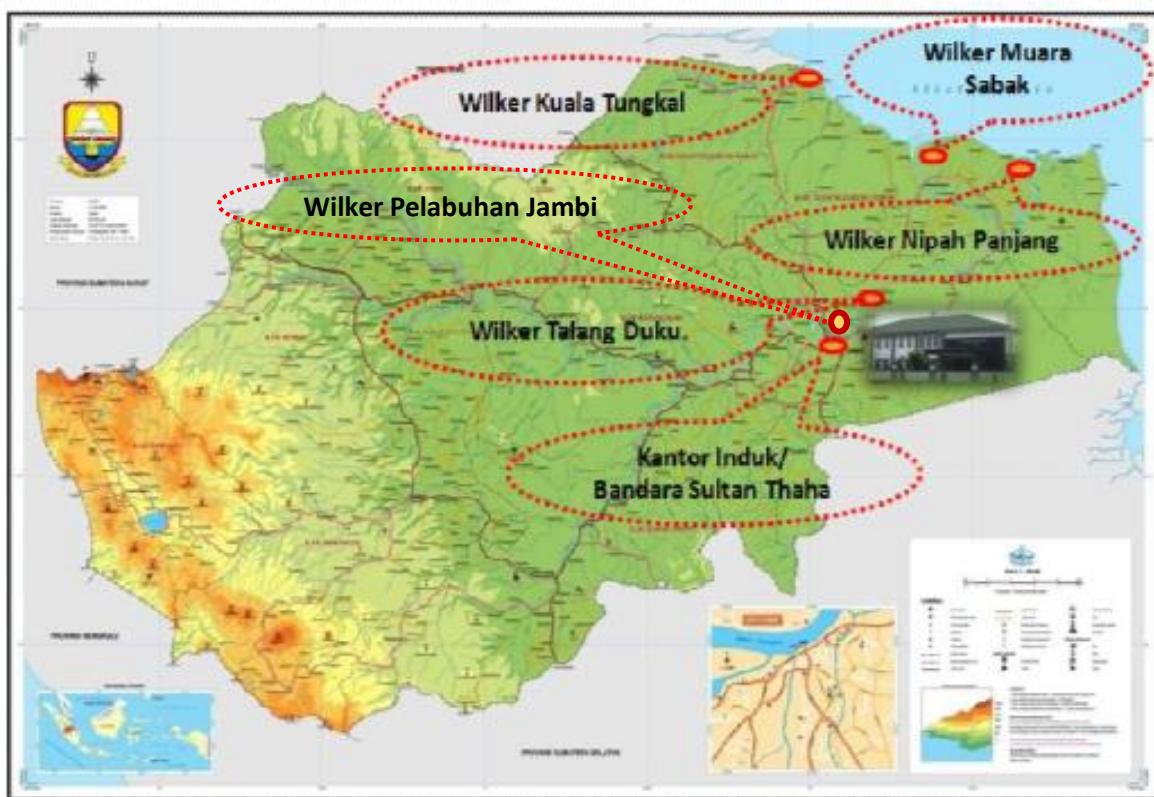
Lampiran 2. SK Tim Penyusun LAKIP KKP Kelas III Jambi Tahun 2021



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi terletak di Provinsi Jambi dan beralamat di jalan raya MTQ no. 2 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi memiliki 6 (enam) wilayah kerja dengan perincian 5 (lima) wilayah kerja adalah pelabuhan laut dan sungai serta 1 (satu) wilayah kerja bandar udara, yang mana wilayah kerja tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Deskripsi jarak tempuh dari Kantor Induk ke Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 1. Jarak Tempuh dari Kantor Induk ke Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

No	Wilker	KKP	Uraian	Jarak (KM)
1	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi	Induk	Berada di Kota Jambi berdekatan dengan Bandara Sultan Thaha Jambi	0
2	Bandara Sultan Thaha Jambi	Wilker	Berada di Kota Jambi Kecamatan Paal Merah, merupakan Pelabuhan udara yang melayani penerbangan dalam negeri (domestik) dan berdekatan dengan kantor induk	± 0,5
3	Pelabuhan Jambi	Wilker	Berada di Kota Jambi, yaitu wilayah aliran sungai Batanghari bertepatan pada wilayah seberang Jambi dan pusat pasar tradisional Angso Duo Kota Jambi	7,1
4	Pelabuhan Talang Duku	Wilker	Pelabuhan Talang Duku berada di Desa Talang Duku, berada di tepi sungai Batanghari, dengan jarak ± 7,5 mil laut dari Pelabuhan Jambi	12
5	Pelabuhan Muara Sabak	Wilker	berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, letaknya berdekatan dengan muara sungai Batanghari. Kurang lebih 5,5 mil laut dari offshore (ambang luar).	75,5
6	Pelabuhan Kuala Tungkal	Wilker	berada di ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terletak di Muara Sungai Pengabuan	126
7	Pelabuhan Nipah Panjang	Wilker	Berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terletak di tepi sungai Lokan, yang merupakan tepi sungai Batang Hari dengan Jarak ≠ 7,5 mil laut dari Pelabuhan Laut	129,5

Tabel di atas menunjukkan bahwa jarak tempuh terjauh dari kantor induk ke wilayah kerja (wilker) adalah wilker Pelabuhan Nipah Panjang dan terdekat adalah Bandara Sultan Thaha Jambi.

B. Isu Strategis

Pemerintah menganggarkan Rp 84,3 triliun untuk Kementerian Kesehatan pada APBN 2021. Anggaran tersebut terbesar kelima dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) atau 6,2 persen dari porsi APBN. Tak cuma itu, Kementerian Kesehatan juga mendapatkan anggaran untuk pos pemulihan ekonomi sebesar Rp 25,4 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19,



imunisasi, sarana prasarana, penelitian, pengembangan kesehatan serta cadangan bantuan iuran BPJS.

Enam hal yang akan menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran tersebut. Keenam prioritas tersebut, yakni masalah kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Selain itu, Kementerian Kesehatan juga akan fokus pada pencegahan stunting, peningkatan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular serta penguatan health security untuk penanganan pandemi, penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta peningkatan sistem kesehatan nasional. Keenam prioritas itu kemudian disebut sebagai Program Nasional sesuai visi dan misi Presiden. Kementerian Kesehatan akan berkomitmen untuk mencapai visi dan misi Jokowi. Terutama pencegahan dan pengendalian penyakit menular, salah satunya Covid-19 dan TBC, serta penguatan health security.

Dengan dukungan anggaran tersebut, Kementerian Kesehatan berharap prioritas kegiatan yang sudah ditetapkan bisa terwujud. Keenam kegiatan prioritas itu merupakan investasi untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan sehat, sehingga bisa membantu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara ini.

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah mendukung kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko dan meningkatkan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi Program di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai berikut: a) Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; b) Pengembangan real time surveilans melalui penguatan sistem survailans nasional dan penguatan sistem jejaring laboratorium nasional, termasuk penguatan laboratorium kesehatan masyarakat; c) Peningkatan inovasi pengendalian vektor, termasuk pengendalian vektor terpadu, dan pengendalian vektor secara biologis; d) Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; e) Penguatan legislasi, kebijakan dan pembiayaan untuk kegawatdaruratan kesehatan masyarakat; f) Peningkatan advokasi



dan komunikasi; g) Peningkatan program pencegahan resistensi antibiotika, penyakit zoonosis, keamanan pangan, manajemen biorisiko; h) Penguatan sistem laboratorium nasional; i) Penguatan reporting dan real time surveillance; j) Membangun sistem kewaspadaan dini; k) Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat; l) Peningkatan kemampuan SDM.

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Untuk mencapai target indikator program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Surveilans dan Karantina Kesehatan
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
6. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
7. Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan pengendalian penyakit

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ikut berperan dalam pencapaian target indikator program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terkait kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dan Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKK tersebut antara lain: 1. Penerbitan dokumen kekarantinaan; 2. Pemeriksaan alat angkut, orang, barang dan lingkungan; 3. Pelayanan kesehatan haji; 4. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi; 5. Peningkatan kapasitas SDM; 6. Pengadaan sarana prasarana kekarantinaan kesehatan.

C. Visi dan Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 5 (Lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan



Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, diantaranya adalah upaya kekarantinaan yang dilakukan di pintu masuk negara.

Dalam penjabaran Renstra Kementerian Kesehatan, disusun Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan serta pemantauan dan pelaporan.

Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes dalam melaksanakan Visi Presiden Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Visi Presiden tersebut, maka telah ditetapkan 9 (Sembilan) Misi Presiden 2020 – 2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkecukupan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.



Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai kewajiban untuk menyusun RAK Tahun 2020-2024. Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yang telah disusun sebagai dokumen perencanaan yang bersifat indikatif mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes yang melaksanakan Visi dan misi Presiden Republik Indonesia.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas, KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan kekarantinaan;
2. pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
4. pelaksanaan pengamatan penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5. pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan nonpengion, biologi, dan kimia;
6. pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
7. pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja;
9. pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. pelaksanaan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi di bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;



13. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
15. pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
16. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
17. pelaksanaan urusan administrasi KKP

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yang dipimpin oleh seorang kepala dengan susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Subbagian Administrasi Umum, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.
2. Instalasi, merupakan unit pelayanan non struktural.
3. Wilayah Kerja, merupakan unit pelayanan non struktural untuk mendukung tugas dan fungsi KKP, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dan dipimpin oleh koordinator. Wilayah Kerja KKP terdiri dari 6 wilayah kerja, yakni.
 - a. Wilayah Kerja Bandara Sultan Thaha
 - b. Wilayah Kerja Pelabuhan Jambi
 - c. Wilayah Kerja Pelabuhan Talang Duku
 - d. Wilayah Kerja Pelabuhan Muara Sabak
 - e. Wilayah Kerja Pelabuhan Kuala Tungkal
 - f. Wilayah Kerja Pelabuhan Nipah Panjang
4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, ditetapkan koordinator yang bertugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dalam hal ini, koordinator yang ditetapkan adalah koordinator Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah (PRL dan KLW) dan koordinator Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE) yang juga disetarakan dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

Berikut ini adalah bagan dari struktur organisasi KKP Kelas III Jambi Tahun 2021 :





Bagan 1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021



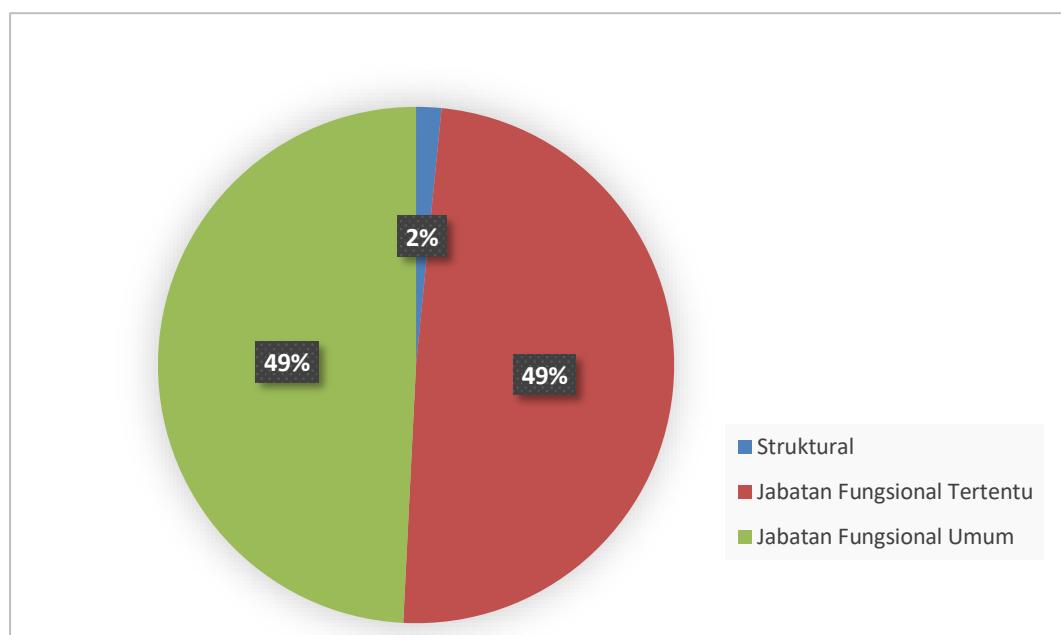
F. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran merupakan elemen yang memegang peran penting untuk mencapai kinerja dalam suatu organisasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hingga periode Desember 2021 jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

a. Menurut Jabatan

- 1) Jabatan Struktural : 1 orang
- 2) Jabatan Fungsional Tertentu : 31 orang
- 3) Jabatan Fungsional Umum : 31 orang



Grafik 1. Persentase Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Jabatan Tahun 2021

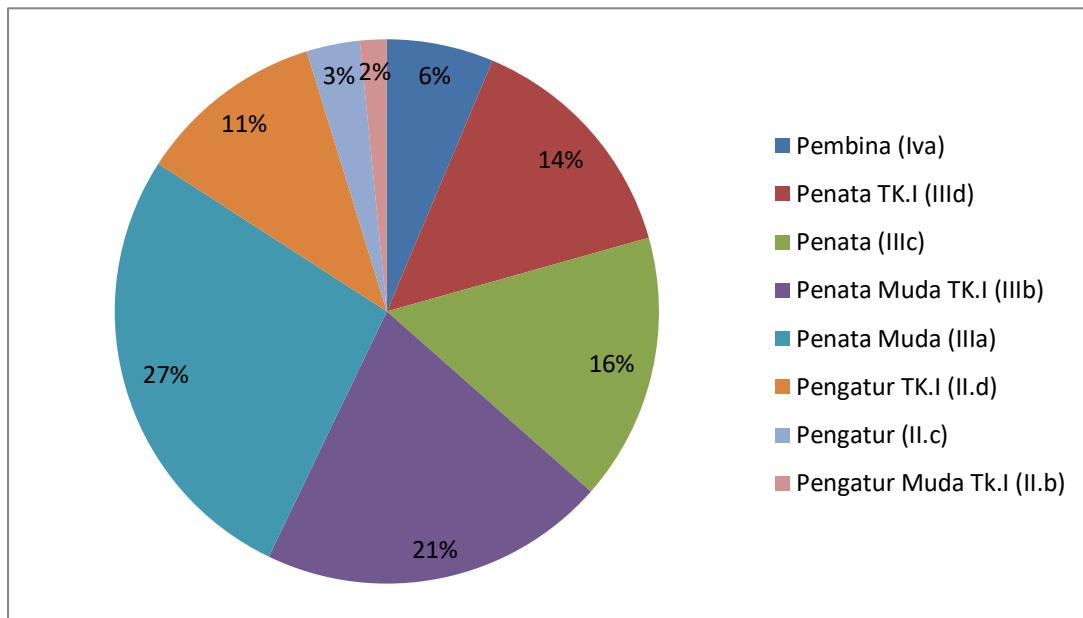
Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Ditjen P2P Nomor : KP.03.04/4/6537/2021 tanggal Agustus 2021, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021, koordinator PRL dan KLW ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum sampai dengan ditunjuknya pejabat definitif.



b. Menurut Golongan dan ruang

Tabel 2. Distribusi Pegawai Menurut Golongan dan Ruang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021

Golongan	Ruang				Jumlah
	A	B	C	D	
IV	4	-	-	-	4
III	17	13	10	9	49
II	-	1	2	7	10
Jumlah	21	14	12	16	63



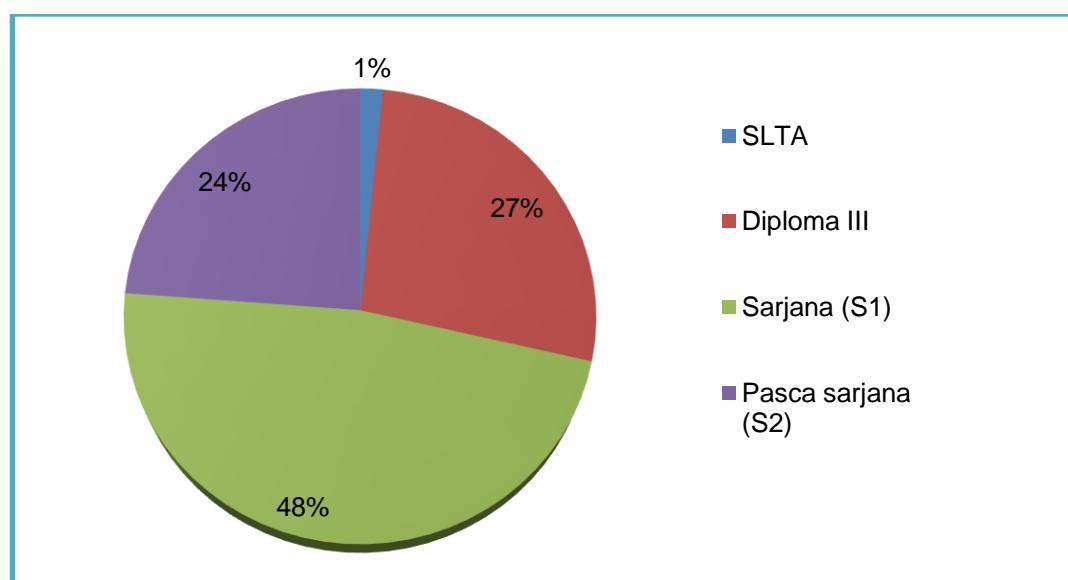
Grafik 2. Distribusi Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Golongan dan Ruang Tahun 2021



c. Menurut Tingkat pendidikan.

Tabel 3. Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021

No	Kualifikasi Pendidikan	JFU	JFT	Struktural	Jumlah
1.	S2 Kesehatan Masyarakat	1	1	1	3
2.	S2 Kesehatan Lingkungan		1		1
3.	S2 Epidemiologi		1		1
4.	S2 Entomologi Kesehatan		2		2
5.	S2 Ilmu Lingkungan		1		1
6.	S2 Biomedik	1			1
7.	S2 Hukum	1			1
8.	S2 Kebijakan Publik	1	1		3
9.	S2 Kebijakan Kesehatan		1		1
10.	S2 Ekonomi	1			1
11.	S2 SIM Kesehatan	1			1
12.	Dokter	1	2		3
13.	S1 Kesehatan Masyarakat	10	10		20
14.	S1 Keperawatan	2	2		4
15.	S1 Sistem Informasi		1		1
16.	S1 Biologi	1			1
17.	S1 Farmasi	1			1
18.	D III Kesehatan Lingkungan	2	1		3
19.	D III Keperawatan	5	5		10
20.	D III Farmasi	1			1
21.	D III Analis Kesehatan	1			1
22.	D III Akuntansi		1		1
23.	D III Teknik Komputer		1		1
24.	SMA / Sederajat	1			1
Jumlah		31	31	1	63



Grafik 3. . Distribusi pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021



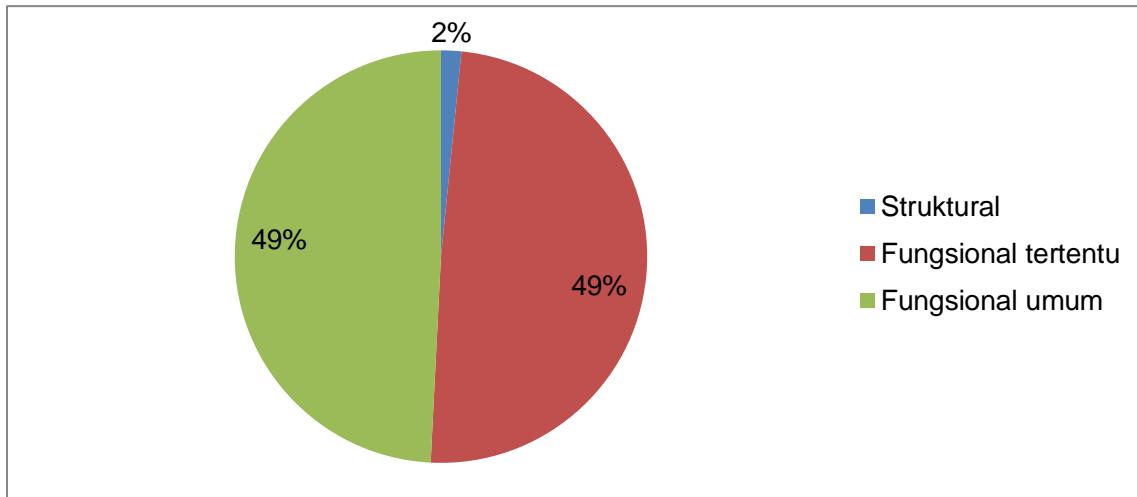
d. Menurut Jabatan Fungsional

Hingga periode Desember 2021, distribusi pegawai berdasarkan jabatan baik struktural maupun fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Pegawai Menurut Jabatan (Struktural dan Fungsional) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021.

No	Kualifikasi Pendidikan	TU		PRL dan KLW				PKSE		Struk-tural	Jumlah	
				PRL		KLW					JFT	
		JFU	JFT	JFU	JFT	JFU	JFT	JFU	JFT		JFU	JFT
1.	S2 Kesehatan Masyarakat					1	1			1	1	1
2.	S2 Kesehatan Lingkungan			1								1
3.	S2 Epidemiologi									1		1
4.	S2 Entomologi Kesehatan			2								2
5.	S2 Ilmu Lingkungan			1								1
6.	S2 Biomedik				1						1	
7.	S2 Hukum	1									1	
8.	S2 Kebijakan Publik			1				1			1	1
9.	S2 Kebijakan Kesehatan								1			1
10.	S2 Ekonomi	1									1	
11.	S2 SIM Kesehatan							1			1	
12.	Dokter			1		2					1	2
13.	S1 Kesehatan Masyarakat	1		8	8			1	3		10	11
14.	S1 Keperawatan					2	1		1		2	2
15.	S1 Sistem Informasi		1									1
16.	S1 Biologi					1					1	
17.	S1 Farmasi					1					1	
18.	D III Kesehatan Lingkungan	1	1								2	
19.	D III Keperawatan	1				2	1	2	4		5	5
20.	D III Farmasi					1					1	
21.	D III Analis Kesehatan					1					1	
22.	D III Akuntansi		1									1
23.	D III Teknik Komputer		1									1
24.	SMA / Sederajat	1									1	
Jumlah		6	3	9	14	11	5	4	10	1	31	31





Grafik 4. Distribusi Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Menurut Jabatan Tahun 2021

G. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

Pada dasarnya laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021 ini menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi selama Tahun 2021. Capaian kinerja tersebut dibandingkan juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka fikir seperti itu, sistematika penyajian laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan uraian kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dan tingkat pencapaiannya. Disamping itu disebutkan pula kendala dan langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan ditahun berikutnya.



3. Daftar Isi**4. Daftar Grafik****5. Daftar tabel****6. Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang visi misi, latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

7. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan tentang perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi pada tahun 2021, meliputi :

A. Perencanaan Kinerja

Uraian singkat tentang Rencana Aksi Kegiatan 2020–2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

B. Perjanjian kinerja

Uraian singkat tentang Penetapan Kinerja (PK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

8. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja yang di dalamnya menjelaskan analisis per indikator dengan mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan indikator maupun yang bersifat mendukung, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi serta usulan pemecahan masalah yang akan diambil. Pada bab ini disajikan juga beberapa sumber daya yang mendukung dalam pencapaian kinerja, seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta sumber daya sarana dan prasarana.

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)



- 5) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan
 - 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- b. Realisasi Anggaran
- Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
9. Bab IV Penutup
- Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.
10. Lampiran
- a. Perjanjian Kinerja
 - b. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga instrumen yaitu Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Perencanaan 5 tahunan KKP Kelas III Jambi tahun 2020 mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Jambi Tahun 2020-2024 sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 akan menggunakan indikator yang tertera pada RAK KKP Kelas III Jambi Tahun 2020-2024.

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Jambi Tahun 2020 – 2024

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.



Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif, salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, diantaranya di pintu masuk Negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi memiliki tujuan strategis yaitu Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.

Dalam mencapai tujuan strategis ditetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah. Terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dikembangkan untuk menjawab isu strategis dan mencapai sasaran serta tujuan. Agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, maka strategi dilaksanakan sesuai skala prioritas. Strategi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dilakukan dengan:

1. Memperbaiki manajemen program
2. Meningkatkan kualitas SDM
3. melengkapi sarana dan prasarana
4. Meningkatkan upaya kekarantinaan dan surveilnas epidemiologi
5. Peningkatan upaya keehatan dan lintas wilayah
6. Meningkatkan upaya pengendalian risiko lingkungan
7. Mengadakan koordinasi, kemitraan, dan jejaring kerja, kajian dan pengembangan teknologi



Dengan memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2020-2024 tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi KKP.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan di evaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Sasaran strategis KKP Kelas III Jambi dalam Rencana Aksi Kegiatan ditetapkan dengan merujuk pada sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P sebagaimana didistribusikan pada unit pelaksana teknis. Untuk mencapai sasaran strategis, maka Ditjen P2P telah menyusun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diseragamkan bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan se-Indonesia untuk Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan.
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara.
4. Nilai kinerja anggaran.
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
6. Kinerja implementasi WBK satker.
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL.

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diseragamkan oleh Ditjen P2P, maka Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Target Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.



Tabel 5. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Target Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2020 – 2024.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan (sertifikat)	960.907	961.200	961.450	961.700	961.950
	2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang ddikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan (%)	90%	91%	92%	93%	94%
	3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara (%)	85%	86%	87%	87%	88%
2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	80	81	82	83	84
	5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0	81	82	83	84
	6. Kinerja implementasi WBK satker	70	75	78	80	81
	7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL (%)	45%	46%	47%	48%	49%

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun. Acuan ini terdiri atas sasaran kegiatan/output, indikator kinerja kegiatan, target pencapaian serta alokasi anggaran dalam 1 (satu) tahun. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sebagai berikut:



Tabel 6. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) KKP Kelas III Jambi Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Laporan pemeriksaan orang, barang, lingkungan, sertifikat/dokumen PHQC, SSCEC, COP	880.000	651.645.000
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Laporan pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan	95%	463.590.000
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	Kelengkapan data surveilans, Jumlah Sinyal SKD KLB dan bencana di pelabuhan/bandara yang direspon <24 jam, Penyusunan rencana kontigensi, Indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, Tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah, kepadatan lalat < 2, TTU memenuhi syarat, TPM laik hygiene, Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	90%	257.145.000
		4. Nilai kinerja anggaran	Nilai SMART pada emonev DJA	83	56.250.000
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai IKPA pada OM SPAN	93	38.190.000
		6. Kinerja implementasi WBK satker	Hasil Penilaian Pre Assessment oleh Tim Itjen Kemenkes	75	76.530.000
		7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam 1 tahun	47%	292.609.000



B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja)

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Pernyataan penetapan kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Isi perjanjian kinerja berupa RKT tahun anggaran 2021 serta dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan jumlah nominal anggaran sebesar Rp.14.489.098.000,-. Dokumen perjanjian kinerja (penetapan kinerja) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021 sebagai berikut :



Tabel 7. Perjanjian Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021

No	Perjanjian Kinerja Awal				No	Perjanjian Kinerja Revisi			
	SASARAN STRATEGIS	N o.	INDIKATOR KINERJA	TARGET		SASARAN STRATEGIS	N o.	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	513.000	1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1.	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	880.000	
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%			2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	90%			3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	90%	
		Nilai kinerja anggaran	83			4.	Nilai kinerja anggaran	83	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93			5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	
		Kinerja implementasi WBK satker	72			6.	Kinerja implementasi WBK satker	75	
		Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%			7.	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	47%	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021 disusun berdasarkan data pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja diperoleh melalui perhitungan persentase dari angka realisasi terhadap angka target. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh pencapaian masing-masing indikator. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam kurun waktu Januari – Desember tahun 2021.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dibandingkan dengan tahun 2020. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).

Dalam dokumen Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021 telah ditetapkan sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun.



Dalam rangka mencapai sasaran strategis, perlu ditinjau indikator-indikator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yang telah ditetapkan.

Pengukuran pencapaian sasaran strategis pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dilakukan dengan asumsi bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi secara keseluruhan, dihitung berdasarkan jumlah indikator yang tercapai dibagi dengan target tahun berjalan.

Di bawah ini akan disampaikan hasil pengukuran kinerja untuk masing-masing indikator kegiatan :

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	880.000	1.164.523	132,33
	2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%	100%	105,26
	3. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk Negara	90%	112,50%	125
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	83	83,74	100,89
	5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	86,30	92,79
	6. Kinerja implementasi WBK satker	75	72,64	96,85
	7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	47%	47,62%	101,32
Total Rata-rata % Capaian Kinerja KKP Kelas III Jambi Tahun 2021				107,78



A. Capaian Kinerja

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

a. Pengertian

Adalah kegiatan pengawasan faktor risiko melalui pemeriksaan pada orang (ABK/Crew/Penumpang), alat angkut (kapal/pesawat) dan barang bawaan dan lalu lintas obat, makanan, kosmetik, alat kesehatan dan bahan adiktif apakah telah sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan.

b. Defenisi Operasional : Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan yang dicapai melalui kegiatan Pemeriksaan/ Penapisan orang, Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, Pemeriksaan Barang dan Pemeriksaan Lingkungan (TTU, TPM) pada Tahun 2021.

c. Rumus/Cara perhitungan :

Jumlah pemeriksaan

$$\begin{aligned} &= \text{Pemeriksaan orang} + \text{Pemeriksaan Alat Angkut} \\ &+ \text{Pemeriksaan Barang} + \text{Pemeriksaan Lingkungan} \end{aligned}$$

d. Capaian Indikator

Sesuai dengan definisi operasional, terdapat empat komponen yang menjadi ukuran dari terpenuhinya pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan, dimana empat komponen tersebut adalah:

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021 bahwa capaian indikator Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan pada Tahun 2021 adalah 1.164.523 dari target sebesar 880.000, artinya pada indikator ini KKP Kelas III Jambi sudah mencapai target dari target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 132,33% (tabel 9).



Tabel 9. Capaian Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2021

No	Breakdown Indikator	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Pemeriksaan/penapisan orang	861.112	1.139.107
2	Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina	18.400	23.616
3	Pemeriksaan Barang	200	1.456
4	Pemeriksaan Lingkungan	288	344
	Total	880.000	1.164.523
	% Capaian		132,33

Pada indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan hasil kegiatan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana terjadi peningkatan hasil kegiatan pemeriksaan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan di Tahun 2021. Pada Tahun 2020 kegiatan pemeriksaan dilakukan sebanyak 1.025.969 kegiatan pemeriksaan, sedangkan pada Tahun 2021 pemeriksaan sebanyak 1.164.523 artinya terdapat peningkatan sebesar 138.554 kegiatan atau sebesar 13,5% (Tabel 10). Peningkatan terjadi akibat adanya pengurangan pembatasan lalu lintas alat angkut sehingga jumlah pelaku perjalanan juga bertambah dibanding tahun sebelumnya dan adanya kegiatan vaksinasi Covid-19 juga meningkatkan jumlah orang yang diperiksa juga bertambah.

Tabel 10. Distribusi Kegiatan Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2020-2021

No	Kegiatan	2020	2021
1	Pemeriksaan/ Penafisan Orang	1,003,045	1.139.107
2	Pemeriksaan/ Penafisan Alat Angkut	20,566	23.616
3	Pemeriksaan Barang	2,017	1.456
4	Pemeriksaan Lingkungan	341	344
	Total	1,025,969	1.164.523

Bila dibandingkan dengan capaian dari instansi KKP sejenis dalam hal ini KKP Kelas III Tembilahan bahwa capaian yang diperoleh oleh KKP Kelas III Jambi pada Tahun 2021 (132,33%) pada indikator yang sama masih di bawah capaian KKP Kelas III Tembilahan (162,85%), hal ini dikarenakan penetapan target KKP Kelas III Tembilahan lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh KKP Kelas III Jambi.



Tabel 11. Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan KKP Kelas III Jambi dengan KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2021

No	Kegiatan	Tembilahan		Jambi	
		Target	capaian	Target	capaian
1	Pemeriksaan/ Penafisan Orang	82.390	129.984	861.112	1.139.107
2	Pemeriksaan/ Penafisan Alat Angkut	11.350	17.319	18.400	23.616
3	Pemeriksaan Barang	1.100	7.345	200	1.456
4	Pemeriksaan Lingkungan	312	312	288	344
Total		95.152	154.960	880.000	1.164.523
Capaian %		162,85		132,33	

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Pemeriksaan dokumen kesehatan pada pelaku perjalanan, skrining kesehatan pada pelaku perjalanan dari wilayah terjangkit, skrininig dan vaksinasi Covid-19 dan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, hygiene dan sanitasi kapal serta dilakukan surveilans epidemiologi pada faktor risiko alat angkut, orang dan barang yang masuk dan keluar dari wilayah kerja KKP Kelas III Jambi dipintu masuk baik pada pelabuhan maupun bandara sesuai dengan SOP KKP Kelas III Jambi.

f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ketersediaan SDM yang melaksanakan pengawasan telah sesuai dengan analisa beban kerja, adanya kejadian pandemi Covid-19 sehingga kualitas pengawasan baik pada alat angkut, orang dan barang semakin ditingkatkan serta adanya kerjasama/koordinasi yang baik dengan lintas sektor.

g. Kendala/masalah yang dihadapi

1) Petugas penerbitan dokumen kesehatan di wilayah kerja masih sering menggunakan dokumen *generate*, sehingga menyebabkan sering terjadinya keterlambatan publish dokumen. Dokumen hanya akan dianggap legal setelah dipublish, artinya apabila kapal sampai tujuan dan dilakukan pemeriksaan dokumen maka dokumen tersebut dianggap tidak sah. Selain itu masih banyak pemohon layanan (agen kapal/Perusahaan pelayaran) yang belum melakukan permohonan layanan penerbitan dokumen kesehatan



secara online, hal itu berdampak memperlambat proses pelayanan dan kurang lengkapnya data permohonan.

- 2) Pada kegiatan Pengawasan pelaku perjalanan masih ditemukan di lapangan bahwa calon penumpang/ABK tidak mengetahui tentang adanya informasi syarat kesehatan sebelum melakukan perjalanan seperti kewajiban mengisi aplikasi e-HAC/HAC dan persyaratan menunjukan surat keterangan bebas Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih ditemukan surat hasil rapid yang diragukan validasinya/keasliannya, proses validasi memakan waktu yang berpotensi terjadi antrian penumpang.
- 3) Belum memiliki tempat khusus untuk pemeriksaan Barang OMKABA berbahaya/infeksius.

h. Pemecahan Masalah

- 1) Pembuatan kebijakan untuk melaksanakan sinkronisasi sinkarkes dan simponi di seluruh wilker pelabuhan. Kebijakan tersebut diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi teknis pelaksanaan sinkornisasi Sinkarkes dan Simponi kepada seluruh staf KKP Jambi sebagai pelaksana teknis layanan kapal, seluruh agen dan perusahaan pelayaran sebagai pengguna layanan. Dilakukan sosialisasi bahwa *generate* dokumen hanya diperuntukkan ketika terjadi permasalahan jaringan, kerusakan alat dukung pembuatan dan pencetakan dokumen. Dilakukan sosialisasi dan *review* penggunaan layanan kapal oleh pengguna jasa (perusahaan pelayaran dan agen kapal).
- 2) Dilakukan sosialisasi terhadap calon pelaku perjalanan baik melalui media cetak maupun media sosial tentang syarat kesehatan melakukan perjalanan bekerja sama dengan pihak Angkasa Pura II dan PT pelindo terkait penempatan media KIE. Fasilitas *autogate* untuk validasi dokumen kesehatan digital sebagai syarat perjalanan, dimana petugas KKP berfungsi sebagai *help desk* untuk membantu validasi manual pada permasalahan validasi digital selama tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
- 3) Pemeriksaan OMKABA barang berbahaya/infeksius dilakukan di lokasi pengemasan sesuai permohonan yang diajukan.

i. Analisis efisiensi sumber daya

Anggaran yang dialokasikan untuk indikator pertama ini adalah Rp.651.645.000 dan terealisasi sebesar Rp. 651.470.134 (99,97%). Capaian indikator pertama pada tahun 2021 adalah sebesar 1.164.523 pemeriksaan



dari target yang ditetapkan sebesar 880.000 pemeriksaan (132,33%) artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 32,36%.

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

a. Pengertian

Adalah kegiatan pengendalian faktor risiko penyakit dipintu masuk yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

b. Defenisi Operasional: faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun

c. Rumus/cara perhitungan :

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%.

$$\text{Faktor yang dikendalikan} = \frac{\text{Jumlah faktor risiko dikendalikan}}{\text{Jumlah faktor risiko ditemukan}} \times 100\%$$

d. Capaian Indikator

Sesuai dengan definisi operasional, terdapat empat komponen yang menjadi ukuran dari terpenuhinya faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, dimana empat komponen tersebut adalah:

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 bahwa capaian indikator faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2021 adalah dari 1.164.523 yang diperiksa ditemukan 25.120 faktor risiko yang harus dikendalikan, KKP Kelas III Jambi mampu mengendalikan seluruh faktor risiko yang ditemukan sehingga capaian indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah sebesar 100% (Tabel 12).



Tabel 12. Capaian faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Tahun 2021

No	Faktor Risiko	Jumlah FR yang diperiksa	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR yang dikendalikan	% Capaian
1	Faktor Risiko pada orang	1.139.107	23.656	23.656	100
2	Faktor Risiko pada Barang	1.456	1.456	1.456	100
3	Faktor Risiko pada Alat Angkut	23.616	2	2	100
4	Faktor Risiko pada Lingkungan	344	6	6	100
Total		1.164.523	25.120	25.120	100

Progress *breakdown* capaian indikator ini dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga diketahui progress capaian indikator melalui perbandingan hasil pemeriksaan yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 13. Capaian faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Tahun 2020 s.d Tahun 2021

No	Breakdown Indikator	2020				2021			
		Jumlah yang diperiksa	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR yang dikendalikan	% Capaian	Jumlah yang diperiksa	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR yang dikendalikan	% Capaian
1	Faktor Risiko pada orang	1,003,045	785	785	100	1.139.107	23.656	23.656	100
2	Faktor Risiko pada Alat Angkut	20,566	0	0	0	1.456	2	2	100
3	Faktor Risiko pada Barang	2,017	37	37	100	23.616	1.456	1.456	100
4	Faktor Risiko pada Lingkungan	341	6	6	100	344	6	6	100
Total		1,025,969	828	828	100	1.164.523	25.120	25.120	100

Pada indikator faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dimana untuk capaian faktor risiko yang ditemukan



seluruhnya dapat dikendalikan dengan capaian yang sama antara tahun 2020 dan 2021 yaitu 100% (Tabel 13).

Progress realisasi indikator selain membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, juga dapat dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2020 dengan buniy indikator yang sama yaitu Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada tahun 2021 sebesar 89% jika dibandingkan dengan capaian KKP Kelas III Jambi tahun 2021 sebesar 100% maka sudah tercapai target dari RPJMN tahun 2021.

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, hygiene dan sanitasi kapal, vaksinasi serta dilakukan surveilans epidemiologi pada faktor risiko alat angkut, orang dan barang yang masuk dan keluar dari wilayah kerja KKP Kelas III Jambi dipintu masuk baik pada pelabuhan maupun bandara sesuai dengan SOP KKP Kelas III Jambi.

f. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ketersediaan SDM yang melaksanakan pengawasan telah sesuai dengan analisa beban kerja dan adanya kerjasama/koordinasi yang baik dengan lintas sektor.

g. Kendala/masalah yang dihadapi

1) Sesuai dengan pedoman covid-19 revisi Ima bahwasanya pelaku perjalanan yang menunjukkan hasil pemeriksaan positif/reaktif dapat melakukan isolasi mandiri selama tidak ada gejala medis yang memberatkan sehingga kemungkinan transmisi di publik area sulit dikendalikan akibat pasien tidak dapat dirujuk dengan segera. Kasus positif Covid (RDT/PCR) yang ditemukan di pintu masuk pada pelaku perjalanan tidak dapat di follow up oleh KKP setelah meninggalkan area pintu masuk wilayah. Tenaga swab terlatih untuk pengambilan sampel Covid-19 di KKP Jambi belum mencukupi.

2) Masih ditemukan pengemasan barang OMKABA yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku tidak tersedia tempat pemeriksaan OMKABA yang berupa barang berbahaya di KKP.

3) Belum memiliki alat trasprtasi air untuk menuju alat angkut yang memerlukan tindakan kekarantinaan kesehatan, tuntutan kecepatan



pelaksanaan kegiatan yang cepat terkait kebutuhan kegiatan loading yang ingin segera dilakukan dan masa tunggu proses tindakan kekarantinaan kesehatan (disinseksi / dinsinfeksi) pada alat angkut mengharuskan ABK meninggalkan kapal sehingga memerlukan tempat baru untuk menunggu.

h. Pemecahan Masalah

- 1) Perlu adanya tempat sementara untuk isolasi pasien dengan hasil positif/reaktif bekerjasama dengan pemerintah daerah sampai dengan pasien dijemput atau mendapatkan alat transportasi untuk pulang ke alamat asal. Penyampaian notifikasi ke wilayah (Dinkes provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota terkait) terkait kasus positif Covid-19 (RDT/PCR) untuk dapat dilakukan pemantauan lebih lanjut dan dilakukan pencarian kontak kasus di wilayah. Perlu penyelengaraan pelatihan pengambilan sampel/ swab nasofaring dan orofaring sebagai penunjang pemeriksaan laboratorium pada kasus Covid-19.
- 2) Perlu dilaksanakan sosialisasi tata laksana pengiriman barang OMKABA dan pengemasannya kepada pengirim barang OMKABA.
- 3) Perlu alat angkut dengan biaya dibebankan perusahaan pelayaran terkait, perlu penyediaan tempat sementara dalam pengawasan KKP untuk ABK menunggu tindakan pada alat angkut sebelum dapat kembali beraktifitas (proses *loading*), tempat tersebut disediakan/difasilitasi oleh keagenan/perusaan pelayaran yang menaungi kapal tersebut.

i. Analisis efisiensi sumber daya

Anggaran yang dialokasikan untuk indikator kedua ini adalah Rp. 463.590.000 dan terealisasi sebesar Rp. 463.438.950 (99,97%). Capaian indikator kedua pada tahun 2021 adalah sebesar 100% pemeriksaan dari target yang ditetapkan artinya terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,03%.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

a. Pengertian

Kegiatan pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara (pelabuhan udara/laut) terhadap masuk dan keluarnya penyakit di Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

b. Definisi Operasional

Indeks pengendalian faktor risiko yang diperoleh berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan di pintu masuk negara (*point of entry*) baik di pelabuhan atau



bandara dalam periode Tahun 2021. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah:

- a) Kelengkapan data surveilans
 - b) Jumlah Sinyal SKD KLB dan bencana di pelabuhan/bandara yang direspon <24 jam
 - c) Indeks pinjal ≤ 1
 - d) HI perimeter = 0
 - e) Tidak ditemukan larva *Anopheles*
 - f) kepadatan kecoa rendah
 - g) kepadatan lalat < 2
 - h) TTU memenuhi syarat
 - i) TPM laik hygiene
 - j) Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan
- c. Rumus/ Cara Perhitungan

Jumlah kegiatan pengendalian faktor risiko yang dilaksanakan/dicapai di pintu masuk negara dibagi dengan jumlah pengendalian faktor risiko yang ditargetkan dikali 100%

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

$$= \frac{\sum \text{Kegiatan Pengendalian Faktor risiko yang dicapai}}{\sum \text{Kegiatan Pengendalian Faktor risiko yang ditargetkan}} \times 100\%$$

d. Capaian Indikator

Seperti yang telah dijelaskan pada definisi operasional bahwa terdapat sepuluh (10) komponen yang menjadi ukuran dari terpenuhinya indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, dimana empat komponen tersebut adalah:

- 1) Kelengkapan data surveilans
- 2) Jumlah Sinyal SKD KLB dan bencana di pelabuhan/bandara yang direspon <24 jam
- 3) Indeks pinjal ≤ 1
- 4) HI perimeter = 0
- 5) Tidak ditemukan larva anopheles
- 6) kepadatan kecoa rendah
- 7) kepadatan lalat < 2
- 8) TTU memenuhi syarat



- 9) TPM laik hygiene
- 10) Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021 bahwa capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara pada Tahun 2021 adalah dari 392 yang ditargetkan tercapai 441, KKP Kelas III Jambi telah melaksanakan kegiatan pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara sehingga capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk negara adalah sebesar 112,50% (Tabel 14).

Tabel 14. Capaian Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara di Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi Tahun 2021

No	Breakdown Indikator	Jumlah Kegiatan FR yang ditargetkan	Jumlah Kegiatan FR yang dicapai	% Capaian
1	Kelengkapan data surveilans	72	72	100
2	Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam	37	66	178,4
3	Penyusunan rencana kontigensi	0	0	0
4	Indeks pinjal ≤ 1	30	27	90
5	HI perimeter = 0	72	61	84,72
6	Tidak ditemukan larva <i>Anopheles</i>	12	12	100
7	kepadatan kecoa rendah	24	20	83,33
8	kepadatan lalat < 2	24	20	83,33
9	TTU memenuhi syarat	72	71	98,61
10	TPM laik hygiene	72	70	97,22
11	Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	60	60	100
Total		475	479	100,84

Progres *breakdown* capaian indikator ini dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga diketahui progres capaian indikator melalui perbandingan hasil pemeriksaan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

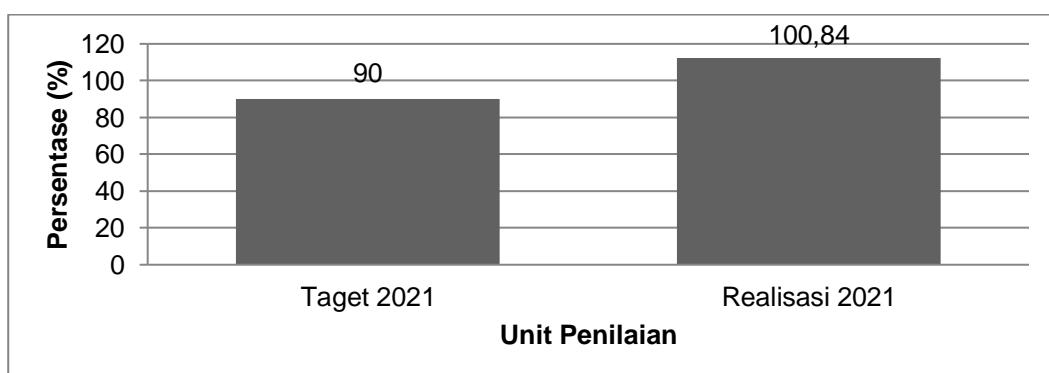


Tabel 15. Capaian Indikator Indeks Pengendalian Faktor risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2020 s.d. Tahun 2021

No	Breakdown Indikator	2020			2021		
		Jumlah Kegiatan FR yang ditargetkan	Jumlah Kegiatan FR yang dicapai	% Capaian	Jumlah Kegiatan FR yang ditargetkan	Jumlah Kegiatan FR yang dicapai	% Capaian
1	Kelengkapan data surveilans	12	12	100,0	72	72	100
2	Jumlah Sinyal SKD KLB dan bencana di pelabuhan/bandara yang direspon <24 jam	240	254	105,8	37	66	178,4
3	Penyusunan rencana kontigensi	0	0	0,0	0	0	0
4	Indeks pinjal ≤ 1	35	49	140,0	30	27	90
5	HI perimeter = 0	20	23	115,0	72	61	84,72
6	Tidak ditemukan larva Anopheles	12	16	133,3	12	12	100
7	kepadatan kecoa rendah	30	31	103,3	24	20	83,33
8	kepadatan lalat < 2	6	8	133,3	24	20	83,33
9	TTU memenuhi syarat	60	64	106,7	72	71	98,61
10	TPM laik hygiene	60	65	108,3	72	70	97,22
11	Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	60	109	181,7	60	60	100
Total		535	631	117,9	475	479	100,84

Pada indikator indeks pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dimana untuk capaian indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan capaian yang tidak sama antara tahun 2020 dan 2021 yaitu 117,9% dan 100,84% (Tabel 15).

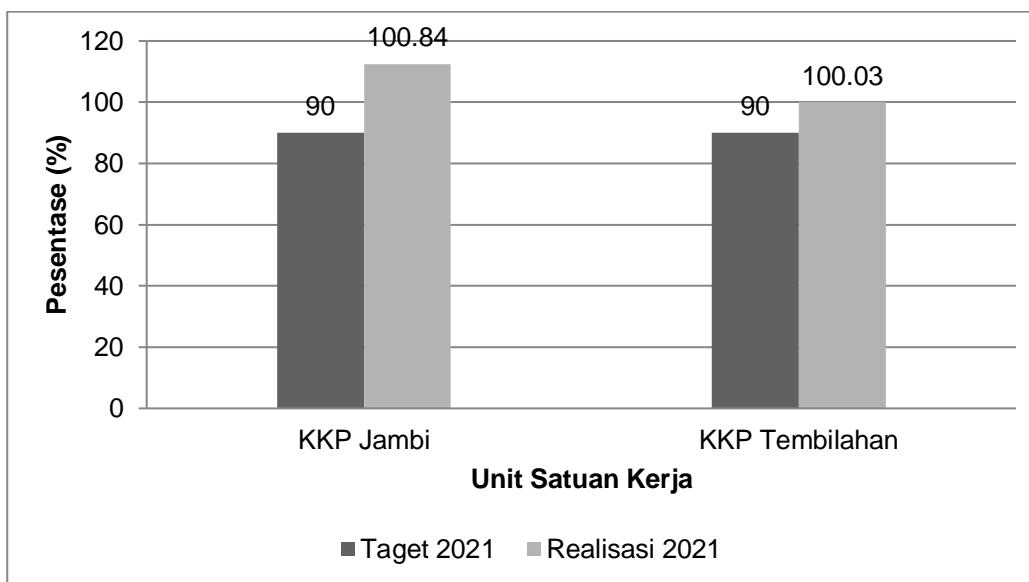
Capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko pengendalian risiko di pintu masuk negara Tahun 2021 adalah sebesar 100,84%, dengan target yang ditetapkan sebesar 90% (grafik 5).



Grafik 5. Capaian Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2021



Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan dimana pada indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara Tahun 2021 KKP Kelas III Jambi realisasi pada Tahun 2021 lebih besar yaitu adalah 100,84% dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan (100,03%) (grafik 6)



Grafik 6. Perbandingan Realisasi indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis Tahun 2021

Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara merupakan salah satu kegiatan yang didanai oleh DIPA KKP Kelas III Jambi Tahun 2021. Alokasi anggaran yang telah disediakan senilai Rp. 257.145.000 dan serapan sebesar Rp. 256.899.000 (99,90%).

e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Menjalin kemitraan dan jejaring kerja antar instansi yang ada di pelabuhan dan bandara guna menyamakan persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang berkembang. Memperkuat koordinasi antara petugas dengan para *tenant*, pelaku usaha, dan masyarakat di sekitar pelabuhan dan bandara dalam hal pengendalian faktor risiko, kepada lintas program dan lintas sektor yang dilaksanakan pada saat pertemuan-pertemuan seperti pertemuan jejaring kemitraan dengan *Stakeholder* dan sosialisasi tupoksi. Pelaksanaan sistem kewaspadaan dini penyakit potensial wabah melalui surveilans berbasis kejadian dan surveilans berbasis indikator dengan melibatkan Fasyankes di area buffer dan stakeholder terkait sehingga setiap peringatan / indikasi wabah/KLB dapat di respon segera.



f. Analisa penyebab keberhasilan

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang melaksanakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan analisis beban kinerja dan juga dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan *stakeholder* di lingkungan KKP Kelas III Jambi serta didukung juga oleh pengadaan bahan penunjang pelaksanaan kegiatan.

g. Masalah yang dihadapi

Belum optimalnya peran serta masyarakat, *tenant*, pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait di sekitar pelabuhan/bandara dalam melaksanakan kegiatan pengendalian faktor risiko, belum optimalnya koordinasi terkait penyampaian informasi sinyal SKD/KLB dari wilayah kerja KKP Jambi.

h. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah melalui pertemuan dan pelatihan.
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat, *tenant*, pelaku usaha, lintas sektor dan lintas program tentang standar peraturan yang berlaku terkait indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait untuk saling koordinasi terkait pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara.

i. Efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pada indikator kinerja indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara adalah Alokasi anggaran yang telah disediakan senilai Rp. 257.145.000,- dan serapan sebesar Rp. 256.899.000. Realisasi anggaran sebesar 99,90%, sementara capaian fisik dari indikator ini adalah 100,84%. Artinya ada efisiensi sumber daya sebesar 0,94%.

4. Nilai Kinerja Anggaran

a. Pengertian

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut : a. nilai Kinerja Anggaran



lebih dari 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Baik; b. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Baik; c. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) termasuk dalam kategori Cukup; d. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) termasuk dalam kategori Kurang; dan e. nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Kurang.

Untuk melihat Nilai Kinerja Anggaran dapat dilihat dari nilai yang muncul pada dashboard aplikasi emonev DJA tahun anggaran berjalan setelah menginput data realisasi volume rincian output (RVRO) dan progress (%).

b. Definisi Operasional

Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja dihitung berdasarkan Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja terkait. Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai yang muncul pada dashboard aplikasi emonev DJA tahun anggaran berjalan. Nilai Kinerja Anggaran pada emonev DJA merupakan data yang terintegrasi pada aplikasi OM SPAN Kemenkeu.

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut : a. capaian output; b. penyerapan anggaran; c. efisiensi; dan d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

c. Rumus/Cara Perhitungan

Nilai Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat satuan kerja. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut :

$$NKI = (PX Wp) + (K X WK) + (CRO X WCRO) + (NE X WE)$$



Keterangan :

- NKI : nilai Kinerja atas aspek implementasi
P : penyerapan anggaran
K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
CRO : capaian RO
NE : nilai efisiensi satuan kerja
Wp : bobot penyerapan anggaran
WK : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
WCRO : bobot capaian RO
WE : bobot efisiensi

Bobot masing-masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :

- Wp = 9,7%
WK = 18,2%
WCRO = 43,5%
WE = 28,6%

d. Capaian indikator

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Untuk memenuhi nilai kinerja anggaran dapat dicapai melalui kegiatan penginputan data realisasi volume rincian output (RVRO) dan progress (%) pada aplikasi emonev DJA. Pada tahun 2021 ini, persentase capaian nilai kinerja anggaran adalah 100,89% yaitu dari target 83 terealisasi sebesar 83,74. Berikut besaran target dan realisasi indikator nilai kinerja anggaran tahun 2021 :



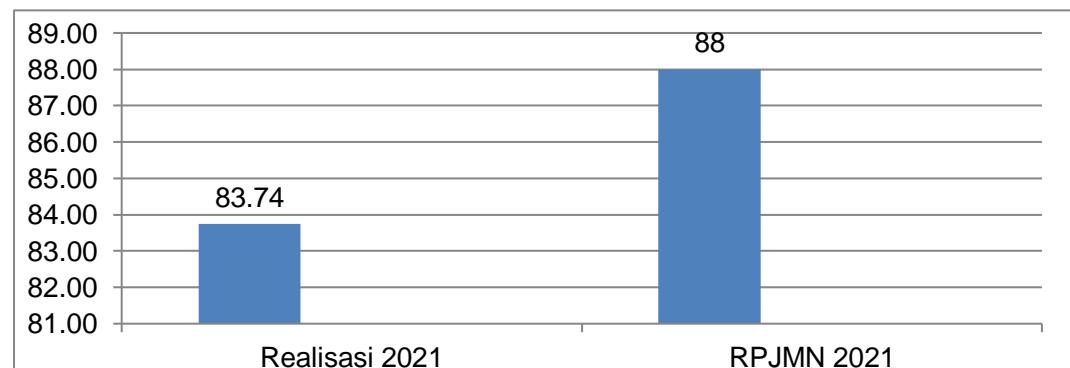
Tabel 16. Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	Penginputan data realisasi volume rincian output (RVRO) dan progress (%) pada aplikasi emonev DJA	83	83,74	100,89

Tabel 17. Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tiap Bulan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Bulan	Target	Realisasi	(%)
Nilai Kinerja Anggaran	Januari	8	0	0
	Februari	29	0	0
	Maret	34	0	0
	April	41	29,25	71,34
	Mei	45	35,87	79,71
	Juni	50	36,68	73,36
	Juli	57	39,90	70,00
	Agustus	64	38,57	60,26
	September	70	39,71	56,73
	Oktober	75	65,22	86,96
	November	79	65,78	83,26
	Desember	83	83,74	100,89

Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2021 yaitu sebesar 88, maka capaian KKP Kelas III Jambi (83,74) masih di bawah dari target RPJMN. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari grafik di bawah ini :

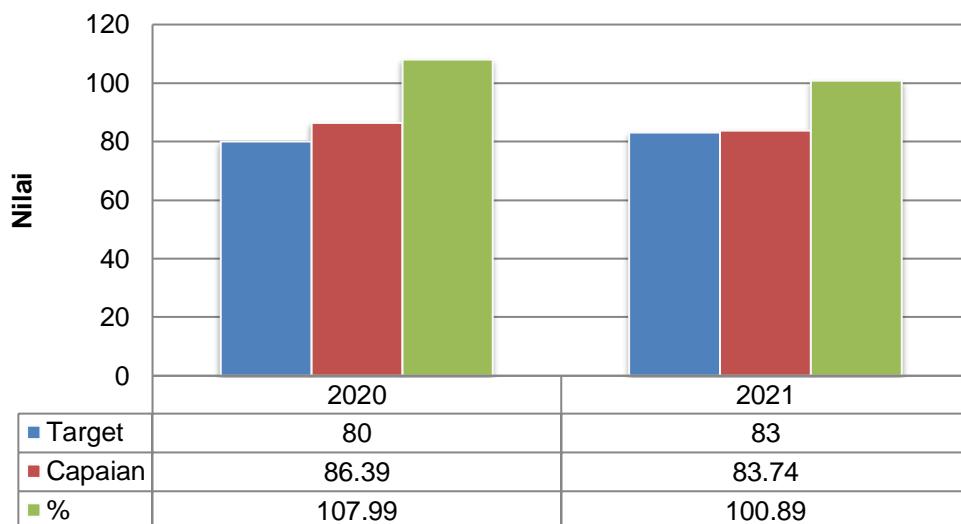


Grafik 7. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 dengan Target RPJMN 2021



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Anggaran yang bersumber dari *dashboard* aplikasi SMART DJA masih di bawah target dari RPJMN 2021.

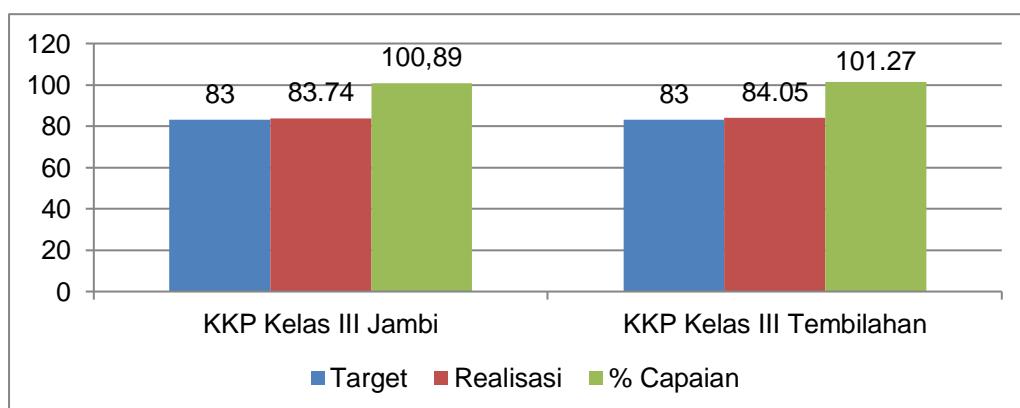
Trend pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2020, dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 8. Perbandingan Target, Capaian, dan Persentase Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 s.d. 2021

Berdasarkan grafik diatas trend perbandingan indikator Nilai Kinerja Anggaran selama dua tahun terakhir, pada tahun 2021 mengalami penurunan persentase sebesar 7,1% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021, pada KKP Kelas III Jambi realisasi pada tahun 2021 lebih rendah yaitu 100,89% dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan (101,27%).



Grafik 9. Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis Tahun 2021



Alokasi anggaran yang disediakan untuk Nilai Kinerja Anggaran senilai Rp.56.250.000,- dan serapan sebesar Rp.55.766.183,- (99,14%).

e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Untuk meningkatkan capaian Nilai Kinerja Anggaran, kegiatan disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD), memonitoring halaman III DIPA agar ada penyesuaian antara penyerapan anggaran dan perencanaan, melakukan revisi anggaran untuk dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, melakukan koordinasi dengan eselon 1 (Bagian Program dan Informasi Ditjen P2P) dan lintas sektor (pihak DJPB dan KPPN) dalam hal pencairan dan revisi anggaran.

f. Analisa penyebab keberhasilan

Nilai Kinerja Anggaran ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain tersedia sumber daya manusia KKP Kelas III Jambi yang bertanggung jawab sesuai tupoksi, adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara seksi dan subbag Administrasi dan Umum di lingkungan KKP Kelas III Jambi untuk melakukan kegiatan yang dapat mempercepat penyerapan anggaran, anggaran direvisi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan (misalnya anggaran semula untuk kegiatan pelayanan kesehatan haji direvisi untuk kegiatan vaksinasi Covid-19).

g. Masalah yang dihadapi

- 1) Untuk merevisi kegiatan pelayanan kesehatan haji, menunggu waktu kepastian ada tidaknya pelaksanaan kegiatan haji sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut membutuhkan waktu untuk direvisi.
- 2) Revisi kegiatan belanja modal dilakukan pada triwulan akhir sehingga untuk realisasi belanja modal yang dapat mendongkrak persentase penyerapan anggaran banyak dilakukan di triwulan akhir.
- 3) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana yang disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

h. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Melakukan koordinasi dengan eselon 1 terkait revisi anggaran untuk kegiatan haji, belanja modal, dan kegiatan lainnya yang dapat mendukung penyerapan anggaran.



- 2) Setelah dilakukan revisi, segera melakukan kegiatan dan membuat pertanggungjawaban agar sesuai dengan Rencana Penarikan Dana dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

i. Efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dianggarkan untuk merealisasikan Nilai Kinerja Anggaran ini adalah Rp.56.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp.55.766.183,-. Anggaran yang terealisasi sebesar 99,14% dan capaian fisik dari Nilai Kinerja Anggaran ini adalah 100,89% (target 83 dan terealisasi 83,74), ini berarti ada efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,75%.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

a. Pengertian

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

b. Definisi Operasional

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) menggunakan 13 indikator penilaian yaitu: Revisi DIPA; Deviasi halaman III DIPA; Pagu minus; data kontrak; pengelolaan UP TUP; LPJ bendahara; Dispensasi SPM; Penyerapan; penyelesaian tagihan; Capaian output; Retur SP2D; Kesalahan SPM; dan perencanaan Kas.

Nilai IKPA merupakan penjumlahan dari nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator. Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker.

c. Rumus/Cara Perhitungan

Perhitungan nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN dilakukan secara elektronik berdasarkan data yang berasal dari transaksi keuangan Satker. Satker dapat memantau nilai IKPA secara periodik melalui OMSPAN masing-masing satker pada menu Monev PA. Nilai IKPA pada OMSPAN akan dirilis secara triwulanan.



Nilai IKPA secara otomatis akan muncul pada aplikasi OMSPAN. Akan tetapi, Kementerian Keuangan memberikan rumus untuk Nilai IKPA sebagai berikut :

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

husus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2021, penilaian indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA dan indikator kinerja Capaian Output dimulai pada periode triwulan II.

d. Capaian indikator

Nilai IKPA dapat dipantau secara periodik pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu. Monitoring pelaksanaan anggaran belanja merupakan kewajiban kementerian/lembaga dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Monitoring dilaksanakan untuk memantau data pelaksanaan anggaran belanja dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta memperbaiki tata kelola anggaran.

Hasil monitoring pelaksanaan anggaran belanja dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya adalah untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran melalui perbandingan nilai kualitas kinerja antar unit organisasi dengan menggunakan indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2021 ini, persentase capaian nilai kinerja anggaran adalah 92,79% yaitu dari target 93 terealisasi sebesar 86,30. Berikut besaran target dan realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2021:

Tabel 18. Target dan Realisasi Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

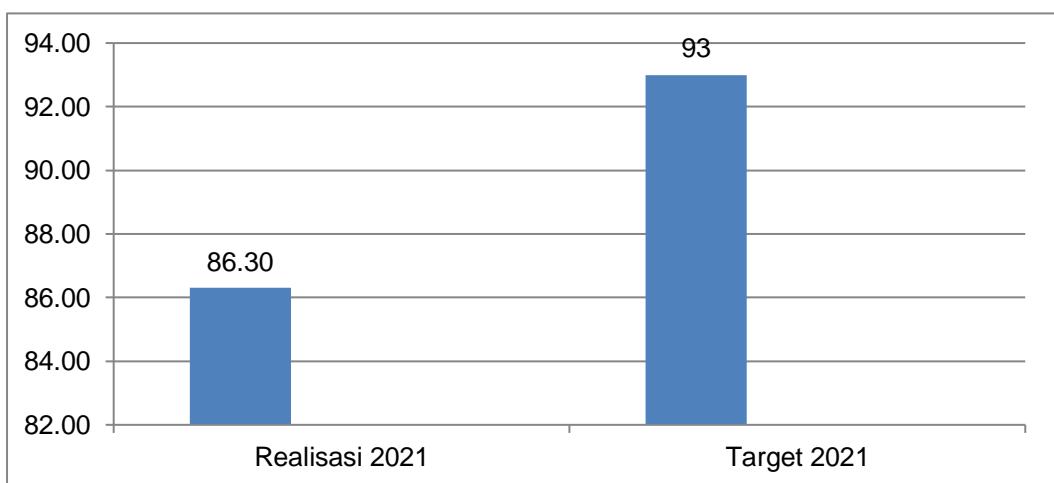
Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Memantau secara periodik melalui aplikasi OMSPAN	93	86,30	92,79



Tabel 19. Target dan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Tiap Bulan Tahun 2021

Indikator Perjanjian Kinerja Kantor	Bulan	Target	Realisasi	(%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Januari	93	97,78	105,14
	Februari	93	98,11	105,49
	Maret	93	98,58	106
	April	93	77,98	83,85
	Mei	93	81,73	87,88
	Juni	93	83,88	90,19
	Juli	93	85,09	91,49
	Agustus	93	88,09	94,72
	September	93	90,31	97,11
	Oktober	93	85,83	92,29
	November	93	85,73	92,18
	Desember	93	86,30	92,80

Perbandingan target dan realisasi Nilai IKPA tahun 2021 dapat dilihat dari grafik di bawah ini :



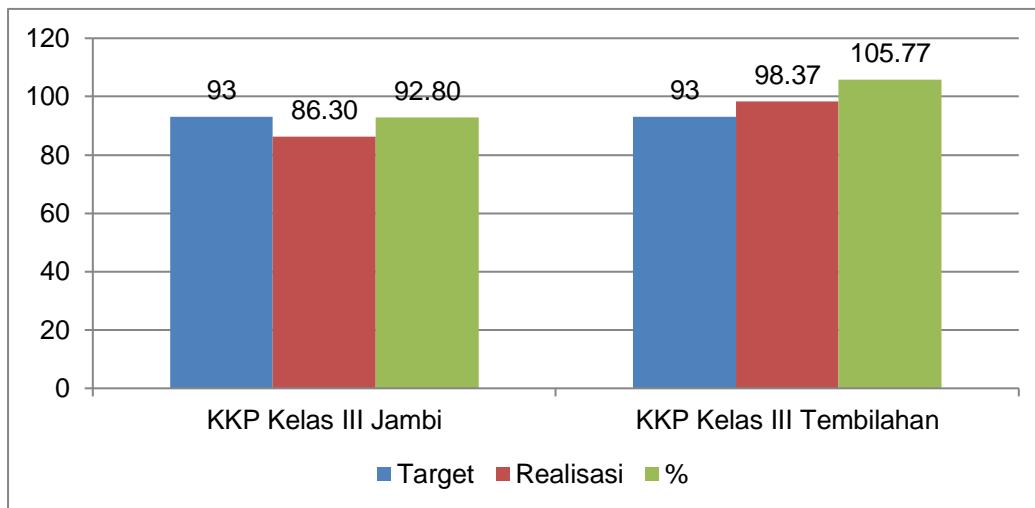
Grafik 10. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi untuk indikator Nilai IKPA Tahun 2021 masih di bawah target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Trend pencapaian indikator Nilai IKPA tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020, karena indikator Nilai IKPA tidak menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan untuk indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Tahun 2021 pada KKP Kelas III Jambi realisasi tahun 2021 lebih rendah yaitu 92,80% dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan (105,77%).



Grafik 11. Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dengan Instansi Sejenis

Alokasi anggaran yang disediakan untuk Nilai IKPA senilai Rp.38.190.000,- dan serapan sebesar Rp.38.024.700,- (99,56%).

- e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Untuk meningkatkan capaian target Nilai IKPA dapat dilakukan upaya :

1. Melakukan revisi DIPA secara selektif.
2. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya (halaman III DIPA).
3. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
4. Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu (max 5 hari kerja sejak tanggal kontrak).
5. Ketepatan waktu dalam revolving UP (minimal 1x dalam 1 bulan) dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP tidak lebih dari 1 bulan dan tidak ada sisa penyetoran dana TUP).
6. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya).
7. Menghindari adanya dispensasi SPM.
8. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D.
9. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran.



10. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan)
11. Meningkatkan akurasi perencanaan kas/RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM.
12. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.

f. Analisa penyebab kegagalan

Indikator ini tidak mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

1. Kurang aktif dalam melakukan penyesuaian halaman III DIPA sehingga akurasi pencairan dana tidak sesuai dengan perencanaannya.
2. Masih terdapat sisa penyetoran dana TUP kegiatan.
3. Pencairan anggaran belum proporsional sehingga belum sesuai dengan target penyerapan anggaran.
4. Kurang efektif dalam hal perhitungan pencapaian output.
5. Kurang teliti dalam penerbitan SPM karena masih ada kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.

g. Masalah yang dihadapi

- 1) Kurangnya pemahaman bahwa halaman III DIPA akan sangat berpengaruh terhadap capaian nilai IKPA.
- 2) SDM untuk operator SAS berbeda dengan petugas monev dalam perhitungan capaian output sehingga kemungkinan terjadi kesenjangan angka capaian output di aplikasi SAS.

h. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Memberikan informasi kepada petugas perencana untuk selalu aktif dalam memonitoring halaman III DIPA agar ada kesesuaian pencairan dana dengan perencanaan.
- 2) Adanya koordinasi antara operator SAS dan petugas monev dalam perhitungan capaian output.

i. Analisis efisiensi sumber daya

Anggaran yang dianggarkan untuk merealisasikan Nilai IKPA ini adalah Rp.38.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp.38.024.700,-. Anggaran yang terealisasi sebesar 99,56% dan capaian fisik dari Nilai IKPA ini adalah 92,80% (target 93 dan



terealisasi 86,30), ini berarti ada efisiensi penggunaan sumber daya sebesar (6,77%).

6. Kinerja Implementasi WBK Satker

a. Pengertian

Proses penilaian satker menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021.

b. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P, lalu penilaian *pre assessment* oleh Tim Itjen Kemenkes.

c. Rumus/Cara Perhitungan

$$\text{Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker} = \frac{\sum \text{Nilai Total Pengungkit} + \sum \text{Nilai Total Hasil}}{\sum \text{Nilai Total Pengungkit} + \sum \text{Nilai Total Hasil}}$$

d. Capaian indikator

Capaian Kinerja Implementasi WBK Satker adalah 96,85% yaitu dengan target 75 dapat direalisasikan sebesar 72,64. Berikut besaran target dan realisasi indikator Kinerja Implementasi WBK Satker tahun 2021:

Tabel 20. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2021

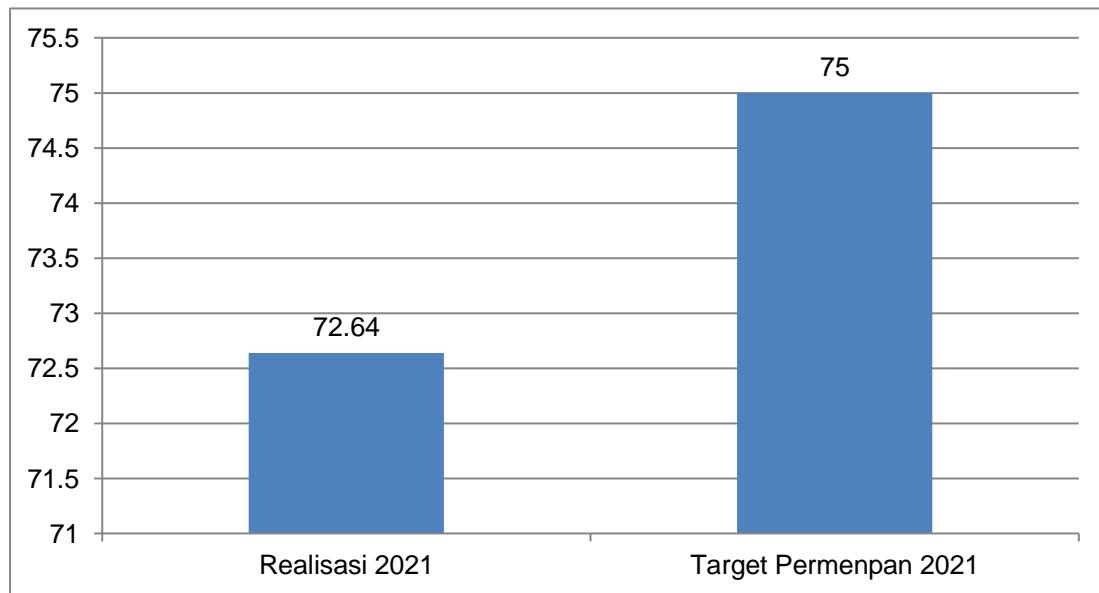
Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kinerja Implementasi WBK Satker	Penilaian <i>Pre Assessment</i> menuju WBK oleh Tim Itjen Kemenkes	75	72,64	96,85



Tabel 21. Target dan Realisasi Kinerja Implementasi WBK Satker Tiap Bulan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Bulan	Target	Realisasi	(%)
Kinerja Implementasi WBK Satker	Januari	72	84,17	116,90
	Februari	72	84,17	116,90
	Maret	72	84,17	116,90
	April	72	84,17	116,90
	Mei	72	84,17	116,90
	Juni	72	84,17	116,90
	Juli	72	84,17	116,90
	Agustus	72	84,17	116,90
	September	75	72,64	96,85
	Oktober	75	72,64	96,85
	November	75	72,64	96,85
	Desember	75	72,64	96,85

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada PermenpanRB No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah tahun 2021 yaitu sebesar 75, maka capaian KKP Kelas III Jambi sebesar 72,64 (96,85%) masih di bawah dari target PermenpanRB No. 10 Tahun 2019. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari grafik di bawah ini :



Grafik 12. Perbandingan Realisasi Indikator Implementasi WBK di Satker Tahun 2021 dengan Target PermenpanRB No. 10 Tahun 2019

Adapun komponen yang harus dibangun oleh unit kerja sebagai penilaian *pre assessment* menuju WBK meliputi :



- 1) Komponen Pengungkit terdiri dari :
 - a) Manajemen Perubahan
 - b) Penataan Tatalaksana
 - c) Penataan Sistem Manajemen SDM
 - d) Penguatan Akuntabilitas
 - e) Penguatan Pengawasan
 - f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 2) Komponen Hasil terdiri dari :
 - a) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
 1. Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
 2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Internal dan Eksternal)
 - b) Kualitas Pelayanan Publik
 1. Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

Menurut PermenpanRB No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, salah satu syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai Menuju WBK adalah memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40. Untuk itu, target Perjanjian Kinerja untuk indikator Kinerja Implementasi WBK Satker yang semula ditetapkan 72 direvisi pada bulan September 2021 menjadi 75.

Dalam rangka pemenuhan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) satuan kerja di lingkungan Ditjen P2P tahun 2020, khususnya terkait indikator Kinerja Implementasi WBK Satker, dimana nilai capaian indikator tersebut diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Unit Eselon I Ditjen P2P, maka eselon I Ditjen P2P melakukan desk reviu implementasi pembangunan zona integritas satker menuju WBK secara virtual, untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020. Hasil desk reviu kinerja implementasi WBK Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi memperoleh nilai 84,17.

Setelah periode penilaian tersebut, pada tanggal 6-7 September 2021 diadakan Pre Assessment menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kemenkes Tahun 2021 secara elektronik/daring pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi oleh Tim Itjen Kemenkes RI. Periode evaluasi penilaian adalah 01 Oktober



2020 s.d 31 Agustus 2021. Dari kegiatan *Pre Assessment* tersebut, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi memperoleh nilai total 72,64 dengan total nilai pengungkit sebesar 38,51 dan total nilai hasil 34,12. Berdasarkan syarat unit kerja sebagai Menuju WBK yang ditetapkan dalam PermenpanRB No. 10 Tahun 2019, maka nilai total tersebut tidak memenuhi syarat minimal WBK.

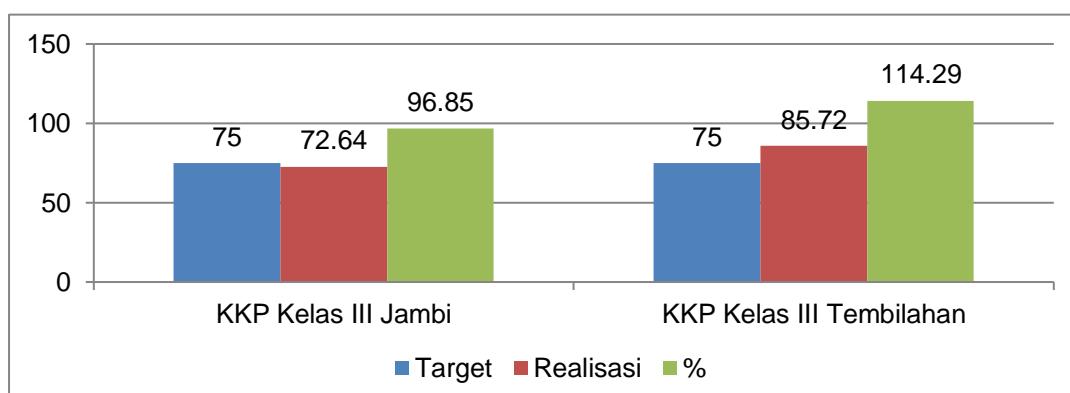
Trend pencapaian indikator Kinerja Implementasi WBK Satker jika dibandingkan dengan tahun 2020, dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 13. Perbandingan Target, Capaian, dan Persentase Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2020 s.d. 2021

Berdasarkan grafik diatas trend perbandingan indikator Kinerja Implementasi WBK Satker selama dua tahun terakhir, pada tahun 2021 memiliki penurunan persentase sebesar 23,39% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan untuk indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2021, pada KKP Kelas III Jambi realisasi pada tahun 2021 lebih rendah yaitu adalah 96,85% dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan (114,29%).



Grafik 14. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis tahun 2021



Alokasi anggaran yang disediakan untuk Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2021 adalah senilai Rp.76.530.000,- dan serapan sebesar Rp.75.966.300,- (99,26%).

e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Tercapainya indikator kinerja implementasi WBK Satker melalui berbagai upaya diantaranya :

- 1) Penandatanganan bersama sebagai bentuk komitmen dari seluruh ASN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi untuk mewujudkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sebagai satker WBK/WBBM pada tanggal 6 Januari 2020.
- 2) Mengundang narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam rangka bimbingan teknis zona integritas WBK/WBBM pada 28 s.d 31 Januari 2020.
- 3) Membentuk tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi
- 4) Koordinasi yang baik antar tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi menjadi satker WBK
- 5) Adanya monitoring dan evaluasi dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi terhadap hasil kerja Tim.

f. Analisa penyebab kegagalan

Indikator ini tidak mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan informasi yang didapat oleh Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tentang Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas untuk penilaian satker menuju WBK/WBBM, misalnya dalam hal program evaluasi atau standar dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian; adanya tugas ganda dari beberapa anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sehingga dibutuhkan waktu yang tepat untuk koordinasi



antar tim; dan pendampingan oleh bagian Hukormas Ditjen P2P baru dilakukan setelah *pre assessment* oleh Tim Itjen Kemenkes RI, yaitu pada bulan November 2021.

- g. Masalah yang dihadapi
 - 1) Ada beberapa anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yang memiliki tugas pada tim yang lain dan harus menjalankan tupoksi jabatannya masing-masing sehingga tugas pada tim ini harus disesuaikan waktunya agar tidak berbenturan dengan tugas yang lain.
- h. Upaya Pemecahan Masalah
 - 1) Setiap Pokja dalam tim harus memahami tugasnya masing-masing dan saling berkoordinasi antar pokja untuk mewujudkan satker WBK
 - 2) Tim SAKIP berkoordinasi dengan pokja akuntabilitas.
 - 3) Monitoring dan evaluasi dari Kepala Kantor dan Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi
- i. Efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dianggarkan untuk merealisasikan indikator kinerja implementasi WBK satker ini adalah Rp.76.530.000,- dan realisasi sebesar Rp.75.966.300,-. Anggaran yang terealisasi sebesar 99,26% dan capaian fisik dari indikator ini adalah 96,85% (target 75 dan terealisasi 72,64), ini berarti ada efisiensi penggunaan sumber daya sebesar (2,41%).

7. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

a. Pengertian

Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan pelatihan, seminar, webinar, dan lain-lain sebanyak 20 jam pelajaran dalam waktu satu tahun.



b. Definisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

c. Rumus/Cara perhitungan

Jumlah ASN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%.

$$\% \text{ Peningkatan Kapasitas ASN} = \frac{\sum \text{ASN yang ditingkatkan kapasitas}}{\sum \text{seluruh ASN}} \times 100\%$$

d. Capaian Indikator

Capaian indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL adalah 101,32% yaitu dengan target 47% dan dapat direalisasikan sebesar 47,62%. Target sebesar 47% dari jumlah keseluruhan ASN (63 orang) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi, maka kapasitas ASN yang ditingkatkan adalah 29 orang. Capaian yang diperoleh sebesar 47,62% dari jumlah keseluruhan ASN (63 orang) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi, maka kapasitas ASN yang ditingkatkan adalah 30 orang.

Tabel 22. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Tahun 2021

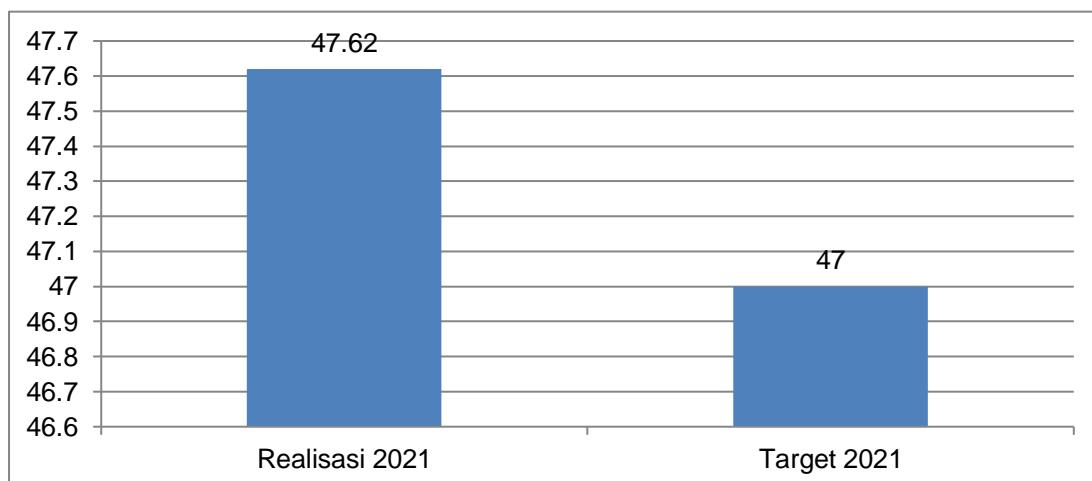
Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Peningkatan kapasitas ASN yang diikuti oleh ASN KKP Jambi sebanyak 20 JPL dalam 1 tahun	47	47,62	101,32



Tabel 23. Target dan Realisasi Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Tiap Bulan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Bulan	Target	Realisasi	(%)
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Januari	1	1,59	159
	Februari	3	3,17	105,67
	Maret	7	7,94	113,43
	April	9	11,11	123,44
	Mei	11	12,70	115,45
	Juni	17	20,63	121,35
	Juli	20	20,63	119,05
	Agustus	24	20,63	99,21
	September	30	20,63	79,37
	Oktober	36	25,40	79,36
	November	42	44,44	105,81
	Desember	47	47,62	101,32

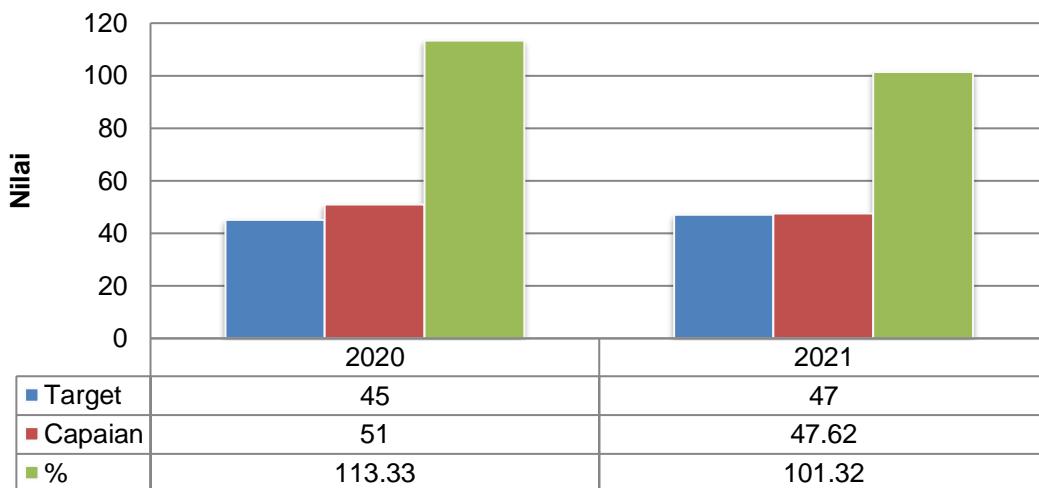
Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 15. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Tahun 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi untuk indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

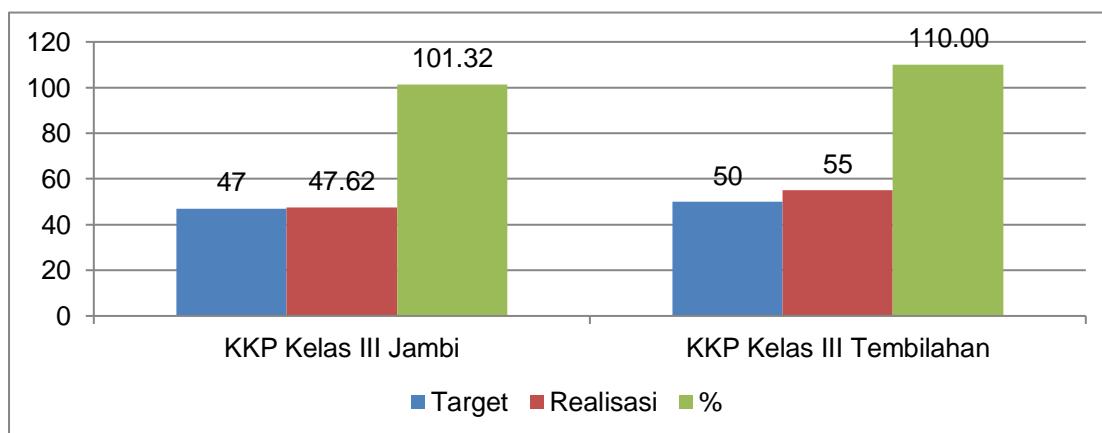
Trend pencapaian indikator Peningkatan Kapasitas ASN dapat dibandingkan dengan tahun 2020 dilihat dari persentase jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan atau seminar. Trend pencapaian indikator Peningkatan Kapasitas ASN dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 16. Perbandingan Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Tahun 2020 s.d. 2021

Berdasarkan grafik diatas trend perbandingan indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN selama dua tahun terakhir, pada tahun 2021 memiliki penurunan persentase sebesar 12,01% jika dibandingkan dengan tahun 2020, karena ada beberapa ASN yang mengikuti pelatihan tidak mencapai 20 JPL dalam 1 tahun.

Jika dibandingkan dengan realisasi dari instansi sejenis dalam hal ini adalah KKP Kelas III Tembilahan untuk indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Tahun 2021 pada KKP Kelas III Jambi realisasi pada tahun 2021 lebih rendah yaitu 101,32% dibandingkan dengan KKP Kelas III Tembilahan (110,00%).



Grafik 17. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN KKP Kelas III Jambi dengan Instansi Sejenis Tahun 2021



Alokasi anggaran yang disediakan untuk Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021 adalah senilai Rp.292.609.000,- dan serapan sebesar Rp.284.952.762,- (97,38%).

e. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Tercapainya indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dicapai melalui berbagai upaya diantaranya :

- 1) Adanya dukungan dari kepala kantor untuk memotivasi seluruh ASN dalam rangka meningkatkan kapasitasnya.
- 2) Menyediakan sarana untuk membantu ASN dalam meningkatkan kapasitasnya, seperti fasilitas internet di kantor karena masa pandemi covid-19 menyebabkan banyak undangan untuk pelatihan/seminar dilakukan secara virtual.

f. Analisa penyebab keberhasilan

Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- 1) Kepala kantor memotivasi seluruh ASN untuk meningkatkan kapasitasnya.
- 2) Masa pandemi menyebabkan banyak undangan untuk pelatihan/seminar dilakukan secara virtual sehingga memudahkan ASN untuk meningkatkan kapasitasnya.
- 3) Partisipasi aktif dari ASN untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung pekerjaannya.

g. Masalah yang dihadapi

- 1) Selama masa pandemi covid-19, pelatihan banyak dilakukan melalui virtual, sehingga perjalanan dinas untuk peningkatan kapasitas ASN tidak banyak dilakukan.
- 2) Tidak semua ASN mempunyai kesadaran untuk mengembangkan kapasitasnya.

h. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) ASN memantau undangan pelatihan/seminar yang dilaksanakan secara virtual sehingga tidak hanya mengharapkan undangan pelatihan/seminar yang mengharuskan melakukan perjalanan dinas.
- 2) Kepala kantor melakukan koordinasi dan memberikan motivasi kepada ASN agar tergerak untuk mengembangkan kapasitasnya.

i. Analisis efisiensi sumber daya

Anggaran yang dianggarkan untuk merealisasikan indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN ini adalah Rp.292.609.000,- dan realisasi sebesar Rp.284.952.762,-.



Anggaran yang terealisasi sebesar 97,38% dan capaian fisik dari indikator ini adalah 101,32% (target 47 dan terealisasi 47,62), ini berarti ada efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,94%.

B. Realisasi Anggaran

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 1 adalah sebesar Rp. 651.645.000.

Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2021:

Tabel 24. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	651.645.000	651.470.134	99,97

Tabel 25. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Bulan	Pagu (Rp)	Realisasi Komulatif (Rp)	% Kumulatif
Januari	651.645.000	17.400.000	2,67
Februari	651.645.000	62.799.314	9,64
Maret	651.645.000	97.329.314	14,94
April	651.645.000	129.399.314	19,86
Mei	651.645.000	156.854.934	24,07
Juni	651.645.000	190.944.934	29,31
Juli	651.645.000	218.834.934	33,58
Agustus	651.645.000	247.844.934	38,03
September	651.645.000	276.284.934	42,40
Oktober	651.645.000	326.124.534	50,05
November	651.645.000	494.484.534	75,88
Desember	651.645.000	651.470.134	99,97

b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020-2021

Berikut ditampilkan tren pagu dan realisasi anggaran indikator 1 dari tahun 2020-2021



Tabel 26. Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2021 Indikator 1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2020	Rp.308,841,000	Rp.307,763,000	99,65
2021	Rp. 651.645.000	Rp. 651.470.134	99,97

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 2 adalah sebesar Rp. 463.590.000.

Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2021:

Tabel 27. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 2 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	463.590.000	463.438.950	99,97

Tabel 28. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 2 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Bulan	Pagu (Rp)	Realisasi Komulatif (Rp)	% Kumulatif
Januari	463.590.000	12.600.000	2,72
Februari	463.590.000	27.000.000	5,82
Maret	463.590.000	41.400.000	8,93
April	463.590.000	55.800.000	12,04
Mei	463.590.000	70.200.000	15,14
Juni	463.590.000	84.600.000	18,25
Juli	463.590.000	99.000.000	21,36
Agustus	463.590.000	113.400.000	24,46
September	463.590.000	127.800.000	27,57
Okttober	463.590.000	162.879.000	35,13
November	463.590.000	317.415.600	68,47
Desember	463.590.000	463.438.950	99,97



- b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020-2021

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2020 – 2021 :

Tabel 29. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2021 Indikator 2 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2020	Rp155,490,000	153,810,000	98,92
2021	Rp 463.590.000	463.438.950	99,97

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

- a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator 3 adalah sebesar Rp. 257.145.000.

Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2021.

Tabel 30. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 3 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	257.145.000	256.899.000	99,90

Tabel 31. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator 3 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Bulan	Pagu (Rp)	Realisasi Komulatif (Rp)	% Komulatif
Januari	257.145.000	9.600.000	3,73
Februari	257.145.000	24.820.000	9,65
Maret	257.145.000	46.710.000	18,16
April	257.145.000	67.768.000	26,35
Mei	257.145.000	85.328.000	33,18
Juni	257.145.000	112.558.000	43,77
Juli	257.145.000	129.990.000	50,55
Agustus	257.145.000	147.588.000	57,39
September	257.145.000	171.719.000	66,78
Okttober	257.145.000	206.905.000	80,46
November	257.145.000	234.079.000	91,03
Desember	257.145.000	256.899.000	99,90



- b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2021

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2020 – 2021 :

Tabel 32. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator 3 Tahun 2020 – 2021
Indikator 3 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
2020	196.945.000	192.271.000	97,63
2021	257.145.000	256.899.000	99,90

4. Nilai Kinerja Anggaran

- a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk Nilai Kinerja Anggaran adalah sebesar Rp.56.250.000,-. Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2021:

Tabel 33. Pagu dan realisasi anggaran Indikator Nilai Kinerja Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	56.250.000	55.766.183	99,14

Tabel 34. Pagu dan realisasi anggaran Tiap Bulan Indikator Nilai Kinerja Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	% Komulatif
Januari	56.250.000	0	0
Februari	56.250.000	0	0
Maret	56.250.000	2.851.000	5,07
April	56.250.000	2.851.000	5,07
Mei	56.250.000	15.907.300	28,28
Juni	56.250.000	23.033.900	40,95
Juli	56.250.000	23.033.900	40,95
Agustus	56.250.000	23.033.900	40,95
September	56.250.000	40.702.212	72,36
Oktober	56.250.000	40.702.212	72,36
November	56.250.000	49.854.583	88,63
Desember	56.250.000	55.766.183	99,14



- b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2021

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2020 – 2021:

Tabel 35. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 – 2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase (%)
2020	13.640.000	11.538.000	84,59
2021	56.250.000	55.766.183	99,14

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk Nilai IKPA adalah sebesar Rp.38.190.000,-. Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2021 :

Tabel 36. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	38.190.000	38.024.700	99,56

Tabel 37. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	% Komulatif
Januari	38.190.000	0	0
Februari	38.190.000	0	0
Maret	38.190.000	0	0
April	38.190.000	0	0
Mei	38.190.000	0	0
Juni	38.190.000	0	0
Juli	38.190.000	0	0
Agustus	38.190.000	0	0
September	38.190.000	0	0
Okttober	38.190.000	0	0
November	38.190.000	34.524.700	90,40
Desember	38.190.000	38.024.700	99,56



- b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2021

Untuk indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, pagu dan realisasi antara tahun 2020 dan 2021 tidak bisa dibandingkan karena indikator ini tidak menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.

6. Kinerja Implementasi WBK Satker

- a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator Kinerja Implementasi WBK Satker adalah sebesar Rp.76.530.000,-. Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2021:

Tabel 38. Pagu dan realisasi anggaran Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Sasaran Kinerja	Indikator Perjanjian Kinerja Kantor	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kinerja Implementasi WBK Satker	76.530.000	75.966.300	99,26

Tabel 39. Pagu dan realisasi anggaran Tiap Bulan Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	% Komulatif
Januari	76.530.000	0	0
Februari	76.530.000	2.250.000	2,94
Maret	76.530.000	2.250.000	2,94
April	76.530.000	2.250.000	2,94
Mei	76.530.000	2.250.000	2,94
Juni	76.530.000	6.364.000	8,31
Juli	76.530.000	6.364.000	8,31
Agustus	76.530.000	8.614.000	11,25
September	76.530.000	8.614.000	11,25
Oktober	76.530.000	8.614.000	11,25
November	76.530.000	21.486.500	28,07
Desember	76.530.000	75.966.300	99,26



- b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2021

Berikut ditampilkan sandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2020 – 2021 :

Tabel 40. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2020 – 2021 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	42.800.000	31.577.417	73,78
2021	76.530.000	75.966.300	99,26

7. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

- a) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran untuk indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL adalah sebesar Rp.292.609.000,-. Berikut rincian realisasi anggaran untuk pencapaian target-target sasaran program tahun 2021 :

Tabel 41. Pagu dan Realisasi Anggaran Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	292.609.000	284.952.762	97,38

Tabel 42. Pagu dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021

Bulan	Pagu (Rp.)	Realisasi Komulatif (Rp.)	% Komulatif
Januari	292.609.000	0	0
Februari	292.609.000	0	0
Maret	292.609.000	0	0
April	292.609.000	0	0
Mei	292.609.000	0	0
Juni	292.609.000	0	0
Juli	292.609.000	19.193.250	6,56
Agustus	292.609.000	19.193.250	6,56
September	292.609.000	55.632.584	19,01
Oktober	292.609.000	75.416.584	25,77
November	292.609.000	219.193.122	74,91
Desember	292.609.000	284.952.762	97,38



- b) Perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2021

Perbandingan pagu untuk indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dari tahun 2020 sampai tahun 2021 ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 43. Sandungan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2021 Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	23.724.000	17.403.400	73,36
2021	292.609.000	284.952.762	97,38



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi kepada pimpinan (Direktur Jenderal) dan seluruh *stakeholders* yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi pada tahun 2021 telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam rangka dukungan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan, meskipun dalam masa pandemi Covid-19. Persentase rata-rata capaian indikator kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tahun 2021 adalah 107,78%.

Dari 7 indikator yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja ada 5 indikator yang tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Kelima indikator itu adalah :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan (132,33%)
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan (105,26%)
3. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk Negara (125%)
4. Nilai kinerja anggaran (100,89%)
5. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL (102,32%)

Namun ada pula yang tidak mencapai target, yaitu indikator :

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (92,80%)
2. Kinerja Implementasi WBK satker (96,85%)



Pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan di tahun 2021 telah merealisasikan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi. Upaya realisasi kegiatan dan capaian indikator kinerja sebagai tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi. Realisasi serapan anggaran sebesar 99,40%.

Realisasi capaian kinerja di tahun 2021 merupakan pembelajaran untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode-periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kekeluargaan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diukur berdasarkan tingkat penggunaan anggaran dan tingkat pencapaian kegiatan keluaran (output kegiatan) selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi sebesar sebesar Rp.14.489.098.000,- dengan penyerapan dana kegiatan sebesar Rp.14.401.920.592,- (99,40%). Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi tetap perlu menjaga kinerja yang sudah dicapai dan meningkatkannya agar lebih optimal.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK), maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi juga menyesuaikan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) untuk periode tahun 2020-2024.
2. Masa pandemi Covid-19 mengakibatkan segala perubahan dalam segi pelaksanaan kegiatan rutin, pengadaan, perjalanan dinas, hingga anggaran.
3. Belum optimalnya kemampuan dan keterampilan petugas untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi KKP.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk dapat mendukung pelaksanaan program baik sarana prasarana gedung perkantoran (wilker) maupun peralatan teknis lain.



B. Tindak Lanjut

Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, diharapkan para Pelaksana Program lebih meningkatkan kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, terlebih lagi belum dapat dipastikan kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Prinsip sistem perencanaan yang sesuai, monev secara teratur, koordinasi rutin, jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor perlu dipertahankan serta selalu mencari alternatif lain yang dapat menunjang upaya perbaikan kinerja kegiatan ke depannya antara lain:

1. Melaksanakan reviu dan revisi terhadap RAK tahun 2020—2024 yang telah disusun sebelumnya menyesuaikan dengan struktur organisasi satker yang baru dan dengan memperhatikan SOTK terbaru Kemenkes RI dan perhitungan target kinerja dengan baik hingga tahun 2024. Serta melakukan revisi perjanjian kinerja yang telah dibuat sebelumnya dengan mengacu pada RAK tahun 2020-2024 yang telah direvisi.
2. Perlunya peningkatan SDM petugas melalui partisipasi dan peran aktif dalam pelatihan-pelatihan baik pelatihan fungsional maupun pelatihan peningkatan kompetensi lainnya yang diadakan oleh Ditjen P2P, PPSDM Kemenkes ataupun KKP lainnya. Hal ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi KKP itu sendiri.
3. Mengusulkan dan mengadakan kebutuhan sarana dan prasarana secara terus menerus dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Lebih meningkatkan jejaring kerja dengan lintas sektor dan lintas program.
5. Peningkatan anggaran kegiatan program Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi untuk menjadi kajian dan bahan telaahan serta bahan dalam upaya perencanaan, pengorganisasian, pengaturan dan pengawasan dalam menjalankan program-program di lingkungan KKP Kelas III Jambi di tahun yang akan datang.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Isha Wardhana, SKM, MKM

Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM. MARS

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 14.489.098.000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM. MARS
NIP 196405201991031003

Ali Isha Wardhana, SKM, MKM
NIP 196901271993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	880.000
		2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	95%
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk Negara	90%
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	83
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	47%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 3.879.073.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 10.610.025.000
TOTAL		Rp. 14.489.098.000

Jakarta, Oktober 2021

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM. MARS
196405201991031003

Ali Isha Wardhana, SKM, MKM
NIP 196901271993031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI

Jl. Raya MTQ No. 2 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah JAMBI 36139,

Telepon : 0741-573432, Fax : 0741-571525

Email : kkp.jambi@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI

NOMOR : IR.2.02/1/ 1236 /2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAKIP/SAKIP DAN RAK
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa kelancaran administrasi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi perlu adanya penetapan Tim Penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Kantor tentang Tim Penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5423);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kauangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja serta peraturan pelaksanaannya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tantang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 01 September 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

**KELAS III JAMBI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAKIP/SAKIP
DAN RAK KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI
TAHUN 2021**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi Tahun 2021.
- KETIGA : Tim Penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi bertugas terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Penanggung Jawab mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan proses penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi
 - B. Koordinator mempunyai tugas Mengawasi proses penyusunan LAKIP/SAKIP dan RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.
 - C. Anggota Mempunyai Tugas :
 1. Mengumpulkan dan mengevaluasi data kegiatan seksi

2. Mengkompilasi data kegiatan seksi dalam bentuk LAKIP
3. Membuat RAK 2020-2025

- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 31 Desember 2020

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III JAMBI



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jambi di Jambi
2. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal P2P Kemenkes RI di Jakarta
5. Sekretaris Direktorat Jenderal P2P di Jakarta
6. Kepala KPPN Jambi di Jambi

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN KELAS III JAMBI.

NOMOR : IR.2.02/1/ 1236 /2020
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAKIP/SAKIP DAN
RAK KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS
III JAMBI TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAKIP/SAKIP DAN RAK KANTOR
KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi
Koordinator : KaSubBag Administrasi Umum
Anggota :
1. Siti Daniati, SKM (Staf Administrasi Umum)
2. Lutvi Heryantoro, SKM (Staf PKSE)
3. Wida Purwaningsih, SKM., M. Sc (Staf PRL & KLW)
4. Renni Pramita (Staf PRL & KLW)

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 31 Desember 2020

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III JAMBI,



ALI ISHA WARDHANA